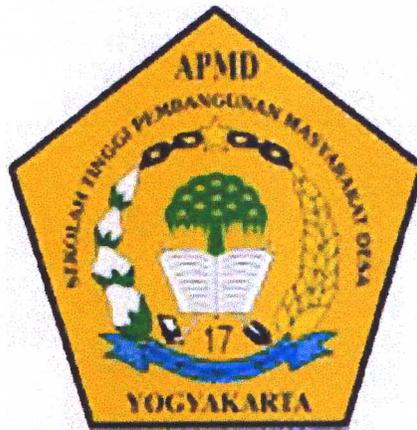


**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI DESA WAYANE, DISTRIK  
AIFAT UTARA, KABUPATEN MAYBRAT, PROPINSI PAPUA BARAT**

*(Penelitian dengan menggunakan metode dektiptif kualitatif di Kampung Wayane, Distrik Aifat  
Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat).*

Dengan Ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Tertentu Agar Dapat Memperoleh Gelar  
Serjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S 1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.



**Bartolomeus Korain**

**16520154**

**PROGERAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**i**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dapat di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar serjana strata satu (S1) program studi ilmu pemerintahan di sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal/Bln : 04 Oktober 2022

Waktu : 09:00-11:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta.

### TIM PENGUJI

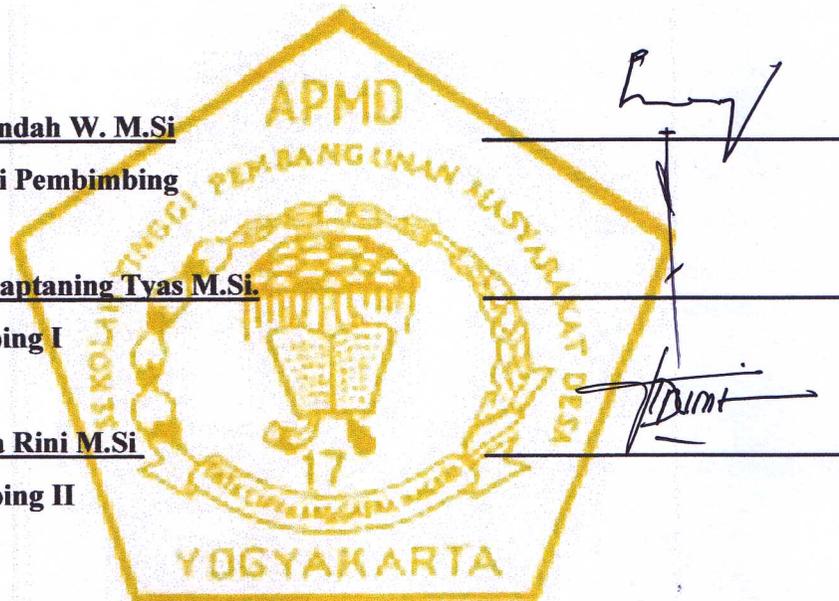
NAMA

TANDA TANGAN

Dra. Safitri Endah W. M.Si  
Ketua Penguji Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas M.Si  
Penguji Samping I

Dra. Tri Daya Rini M.Si  
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahkoko, MA

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **Bartolomeus Korain**

**NIM** : **16520154**

**Program Studi** : **Ilmu Pemerintahan**

Menyatakan bahwa, dengan sesungguhnya Skripsi yang berjudul **“Probelmatika Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat”** merupakan murni karya sendiri, dan menurut pengetahuan saya bahwa semua murni hasil karya tulis saya, saya tidak dapat menguti atau mengambil hasil karya orang lain yang di terbitkan. Terkecuali beberapa unsur pendukung yang diacu dalam naskah ini dan dapat disebutkan pada Daftar Pustaka. Saya menyatakan bersedia untuk menerima sangsi ketika di kemudian hari terdapat ptaktek plagiat yang di tambahkan dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 10/10/2022

Yang Menyatakan



Bartolomeus Korain

16520154

## **HALAMAN PERSEMBAHAN.**

Segala puji hormat dan syukur ucapan kepada Allah Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya yang dapat dilimpahkan kepada saya, sehingga saya sanggup secara manusiawi untuk memulai tahapan study hingga mengakhiri penulisan Skripsi ini dengan sempurna. Berjalanya dimulai studi saya hingga pada mengakhiri penulisan skripsi ini, tidak dapat terlepas dari motivasi, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang dapat di sebutkan dibawah ini;

1. Allah Tuhan dan Bunda Maria yang Kudus dan maha pengasih, atas rahmat serta berkat yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah ini (SKRIPSI) ini dengan baik.
2. Wakil Allah yang merupakan Kedua Orang Tua, Saudara/I dan Seluruh kaka dan Adik saya, atas berkat doa dan motivasi serta dorongan yang selalu menjadi penyemangat bagi saya hingga dapat mampu menyelesaikan karya ini dengan baik.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dra. Safitri Endah W. M.Si, atas bantuan dan bimbingan hingga berperan sebagai ketua penguji yang luar biasa kepada saya. Sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan Selesai tepat waktu.
4. Teruntuk ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas M.Si. selaku dosen penguji samping I skripsi yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki penyusunan skripsi yang baik dan benar.
5. Teruntuk ibu Dra. Tri Daya Rini M.Si sebagai Dosen penguji samping II, atas kesediaan meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk menguji skripsi ini hingga dapat berjalan dengan sempurna.
6. Anak Terkasih, Almahumah Kaka Nona Mourencia Korain, yang selalu menjadi motivasi hidup dan motivasi untuk saya terus bangkit dan berjuang untuk menyelesaikan Skripsi ini dari awal hingga akhir dengan sempurna.
7. Istri Terkasih Didima Yuliana Hegemur, SE. yang selalu mendampingi, menyemangati saya sehingga terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.

8. Keluarga Besar Srahwata di Yogyakarta yang selalu menjadikan nutrisi yang baik sehingga saya menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan keluarga.
9. Keluarga Besar IKPM-AMK Yogyakarta, dimana selalu setia dalam suka-duka selalu memberikan support kepada saya sehingga saya menyelesaikan study melalui penyempurnaan Skripsi ini.
10. Keluarga Om sya Agustinus Tenau, S. Sos., M. Si yag selalu menjadi motivator terbaik bagi saya, dan juga menjadi payung perlindungan yang nyaman bagi saya, sehingga saya dengan semangat dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

## KATA PENGANTAR

Kepada Tuhan dan Bunda Maria yang Maha Esa atas pertolongan dan limpahan berka kepada penulis hingga dapat mempu mnyelesikan Skripsi yang di beri nama **“Problematika Pengelolaan Dana Desa di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat”** dapat berjalan dengan lancar. Skripsi ini dapat di tuliskan sebagi suatu persyaratan bagi mahasiswa guna memperoleh gelar serjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis adalah manusia biasa hinga dapat menyadari bahwa, karya ini belum mencapai pada kalimat sempurna dan masih banyak kekurangan. Hasil karya ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Olehsebab itu, atas dukungan dan arahan dari brbagai pihak maka izinkan penulis untuk haturkan limpah terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, atas kebaikan hati yang dapat merekomendasikan penulis dalam melakukan penelitian di lokasi penelitian.
3. Ibu Dra. Safitri Endah W. M.Si yang dapat bersedia menjadi pembimbing bagi penulis dari mulainya pengajuan Proposal Skripsi hingga mengakhiri penulisan dan masih bersedia sebagai Penguji saat proses pengujian hingga finish dengan baik.
4. Seluruh pegawai dan terlebih khususnya kepada seluruh para bapak dan ibu dosen progeram ilmu pemerintah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dapat mendidik dan membina penulis dari awal masuk kuliah hingga mengakhiri dengan memperoleh gelar serjana strata satu (S1).
5. Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Wayane serta seluruh masyarakat yang penulis tidak dapat menyebut satu-persatu, dimana dapat menyupor data kepada saya saat melakukan observasi hingga mengakhiri skripsi ini dengan baik.

6. Mama, Bapa, Kaka, adik dan seluruh keluarga yang selalu dapat memberi semangat hidup, memberikan dukungan berupa dooa, materi dan nasihat kepada saya hingga dapat menghasilkan skripsi ini dengan hasil yang baik.
7. Istri sya yang terkasih Didima Yuliana Hegemur, SE. Yang selalu ada dan menjadi penyemangat hidup dan juga selalu menjadi penyemangat bagi saya hingga mengakhiri skripsi ini dengan hasil yang memuaskan.
8. Terkasih dan Tersayang yang setulusnya kepada Malaikat kecil ku Almahum Kaka Nona Mourencia Korain, yang selalu menjadi inspirasi hidup dan terus bersemangat untuk berjuang menyelesaikan Skripsi ini dengan Baik.

Yogyakarta.....2022

Bartolomeus Korain

16520154

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....               | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....          | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN.....          | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....         | iv   |
| KATA PENGANTAR.....              | vi   |
| DAFTAR ISI.....                  | viii |
| DAFTAR TABEL.....                | X    |
| DAFTAR GAMBAR.....               | x    |
| MOTO.....                        | xi   |
| INTISARI.....                    | xii  |
|                                  |      |
| BAB I PENDAHULUAN.               |      |
| 1.1 Latar Belakang.....          | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....         | 5    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....       | 5    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....      | 6    |
| 1.5 Literatur Review.....        | 7    |
| 1.6 Kerangka Konseptual.....     | 15   |
| 1.7 Rung Lingkup Penelitian..... | 31   |
| 1.8 Metode Penelitian.....       | 32   |

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| 1. Gambaran Umum Kampung Wayane.....                 | 38 |
| 2. Deskripsi Pos (Lembaga) Penggunaan Dana Desa..... | 39 |
| 3. Deskripsi batas wilayah Kampung Wayane.....       | 41 |
| 4. Jumlah Data Penduduk Tetap (DPT).....             | 41 |
| 5. Aspek Geografis.....                              | 41 |
| 6. Luas Wilayah.....                                 | 41 |
| 7. Kondisi Demografi.....                            | 42 |
| 8. Sumber Daya Alam (SDA).....                       | 43 |
| 9. Aspek Social Dan Ekonomi.....                     | 43 |
| 10. Aspek Budaya Dan Kearifan Local.....             | 43 |
| 11. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa.....             | 44 |
| 12. Pemerintah Kampung Wayane.....                   | 48 |
| 13. Sarana Dan Prasarana Kampung Wayane.....         | 50 |
| 14. Struktur pemerintahan Kampung Wayane.....        | 51 |

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| 1. Penyaluran Dana Desa terhadap kelima Pos atau Unit Penyelenggaraan..... | 52 |
| 2. Problematika Dalam Perencanaan Penggunaan Dana Kampung .....            | 54 |
| 3. Problematika dalam Pelaksanaan Dana Kampung.....                        | 56 |
| 4. Problematika dalam pengusaha Dana Kampung.....                          | 58 |
| 5. Problematika dalam pelaporan hasil Dana Kampung.....                    | 61 |
| 6. Faktor yang mempengaruhi Tata Kelola dana desa di Kampung Wayane.....   | 64 |

## BAB IV PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 77 |
| 4.2 Saran.....      | 80 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Daftar Pustaka..... | 81 |
| Lampiran.....       | 83 |

#### DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Table tabel 1.1 deskripsi informan.....   | 33 |
| Tabel 2.1 Dana Desa dapat dicairkan 3 (tiga) tahap dalam 1 tahun .....                        | 38 |
| Tabel 2. 2 Jumlah anggaran dana Desa yang di berikan Kepada kelima pos dari setiap Tahap..... | 39 |
| Tabel 2.3 Batas Wilayah Kampung Wayane.....   | 40 |
| Tabel 2.4 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kampung Wayane.....                                      | 41 |
| Table 2.6 Pendapatan Masyarakat Kampung Wayane (Profesi Petani).....                          | 44 |
| Tabel 2.7 Pendapatan Masyarakat Kampung Wayane (Profesi PNS).....                             | 45 |
| Tabel 2.8 Sarana Dan Prasarana Kampung Wayane.....  | 48 |
| Tabel 3.1 Penatausahaan Dana Desa.....  | 57 |
| Tabel 3.2 Analisis Primer.....  | 61 |
| Tabel 3.4 Pendidikan Terakhir Perangkat Kampung Wayane.....                                   | 66 |

#### DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Siklus Pengelolaan Dana Desa.....                       | 22 |
| Gambar 1.2 Tahap Analisis Data Kualitatif.....                     | 36 |
| Gambar 2.1 Susunan Struktur BPD Kampung Wayane.....                | 49 |
| Gambar 3.1 Perencanaan Penguasaan Dana Desa Di Kampung Wayane..... | 53 |
| Gambar 3.2 Alur Penatausahaan Keuangan Desa.....                   | 56 |
| Gambar 3.3 Alur Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....               | 60 |

## **MOTTO**

***“KITA SEMUA HIDUP DI SATU BUMI YANG SAMA  
NAMUN KITA BERJALAN DIATAS TAKDIR YANG BERBEDA”***

***JADILAH DIRI SENDIRI DAN KENALILAH DIRI SENDIRI TERLEBIH  
DAHULU  
MAKA KAMU AKAN MENGENALI ORANG LAIN DAN AKAN MENJADI  
ORANG LAIN.***

## INTI SARI

Terwujudnya UU No 6 Tahun 2014 yang dapat di sahkan oleh DPR-RI merupakan sebuah ikon pemberian kekuasaan secara mutlak kepada pemerintah Desa sebagai institusi yang berwenang untuk mengatur, mengurus, dan memenuhi segala kebutuhan utama bagi masyarakat Desa. Guna untuk mencapai tujuan dari UU Desa tersebut maka pemerintah pusat dapat memberikan suntikan Dana (Dana Desa) yang ditransfer langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada rekening Desa Melalui Kabupaten/Kota. Sebagai mana mestinya pemerintah pusat dapat menerbitkan sebuah regulasi sebagai panduan tata kelola Dana Desa melalui Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang tata kelola dana desa yang baik dan secara terstruktur. Mencermati impian Negara dalam membangun Desa di Indonesia, terlebih khususnya di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Pemerintahan Kampung Wayane juga mendapatkan Dana Desa dari pusat, namun terlihat belum mampu bersaing maju dengan Kampung lainnya. maka dalam penelitian ini dapat merumuskan Rumusan Masalah Yakni: Faktor penghambat dalam tata kelola Dana Desa Di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.

Tehnik pengumpulan data sebagai power supplay guna memperkuat karya skripsi ini, peneliti dapat menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif dengan menyusun krangka tahapan penelitian tahapan belanja masalah di lapangan, tahapan penyusunan rencana persiapan implementasi Dana Desa melalui Musyawarah Kampung (MUSKAM), dan prose prosedur tata kelola Dana Desa yang terjadi di Kampung Wayane. Untuk memperoleh data peneliti dapat menggunakan konsep kualitatif untuk mendapatkan informasi dengan langkah awal menggunakan metode observasi, metode wawancara dan dokumentasi. Proses mengolah data dengan menggunakan konsep analisis data yang dimulai dari metode Reduksi Data (Pengumpulan Data), Display Data (Penyajian Data), mengakhiri dengan memberikan kesimpulan tentang problematika tata kelola dana Desa di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh dan di analisis, dapat memberikan hasil kesimpulan tentang problematika dalam tata kelola dana Desa di Kampung Wayane dapat disimpulkan menjadi tiga yaitu; *pertama*, proses pengendalian tata kelola dana desa di Kampung Wayane mengalami problem karena pelaku atau aparatur Kampung Wayane juga masih memiliki Sumber Daya Manusia yang dibawah standar. *Kedua*, pelemahan pengawasan atau pendamping Desa dari pemerintah kepada pelaku pengendalian dana desa di Kampung Wayane. *Ketiga*, Prinsip tata kelola dana desa dapat berjalan sesuai dengan visi

dan misi elit tertentu sehingga tata kelola dana desa di Kampung Wayane tidak dapat berjalan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014.

Kata Kunci; *Pemerintah Kampung, Eektivitas, Tata Kelola Dana Desa, Elt.*

## **BAB I.**

### **Pendahuluan.**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu Negara yang telah berprinsip menggunakan asas Desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat Indonesia. Asas Desentralisasi merupakan limpahan tanggungjawab dalam pelayanan public bagi masyarakat dan dari pemerintahan Pusat ke pemerintah Daerah dan berakhir pada pemerintah Kampung. Kampung di Indonesia telah di akui oleh Negara sebagai sebuah daerah otonom yang independent, melalui amanah peraturan konstitusi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga UU No. 23 Tahun 2014.

Diantara Negara di dunia, Indonesia merupakan system pemerintah yang dapat menjalankan system Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi kedaerahan yang dijalankan dengan caranya masing-masing. Kewenangan dari negara kepada setiap Daerah Otonom (Pemerintah Desa) dapat memiliki kewenangan dalam pelaksanaan roda Pemerintah Kampung guna mengatur dan mengurus seluruh kebutuhan masyarakatnya. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah dijalankan dengan cara kewenangan bersifat terstruktur yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan didesentralisasikan atau dialihkan kepada pemerintahan daerah, sehingga kekuasaan tidak tersentralistik di tangan pemerintah pusat saja (Agussalim Andi, 2007: 81) sehingga terjadinya proses desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Desa merupakan unit daerah otonom terkecil dari Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam kontek pembangunan Kampung dan pemberdayaan Masyarakat Kampung, strategi pembangun Kampung sebagai obyek pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada orde baru pemerintah pusat dan pemerintah daerah menempatkan posisi Kampung sebagai daerah pengawasan pembangunan. Penempatan Kampung Sebagai pengawasan sebagai metode perpanjangan kekuasaan. UU No. 5/1979 sebagai sebuah senjata efektif untuk mematikan Kampung. Sepanjang reformasi Kampung belum mendapatkan kesempatan untuk menentukan nasib-Nya sendiri. UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 berupaya memberikan ruang bagi Kampung, namun masih ada upaya melalui program pemberdayaan nasional yang

mematikan implementasi pelayanan public di tingkat Kampung. Daerah pun masih setengah hati memberikan hak-hak dasar Kampung sebagai sasaran pembangunan. Dengan dalil membantu masyarakat miskin, baik pusat maupun daerah merupakan program pemberdayaan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Pada tahun 2008 ACCES tahap II memulai pemberdayaan di 20 Kabupaten di wilayah Indonesia Timur, di Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Utara (Sultra), Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat. ACCES tahap II mendorong pemerintah Desa bersama masyarakat berbondong-bondong membangun Kampung sesuai dengan Misi-Nya.

Pemerintah kembali membahas Rancangan Undang-Undang Kampung (RUU Kampung), sebagai solusi untuk melepaskan dan memberikan Kampung sebagai daerah otonom yang mampu menentukan nasibnya sendiri melalui UU No.32 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014. Kewenangan Kampung kembali terlihat menghirup angin segar. Kehadiran UU No.6 Tahun 2014 membagikan Kampung dan Kampung adat sesuai nama khasnya. Membangun Kampung adalah membangun Indonesia, karena 80% masyarakat Indonesia menetap dan Hidup di daerah Kampung (Eko, 2014: 2) dikutip dalam Ismail (Ismail, 2016). (Hoesada, 2016: 231) menyatakan bahwa Pembangunan sarana prasarana Kampung dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari Negara. (Brodjonegoro, 2014) dikutip dalam Ismail (2016) menyatakan bahwa Kampung akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kampung akan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Kewenangan Kampung berhasil di terapkan pada kehadiran UU No.6/2014. Kampung diberikan kekuasaan untuk membangun dan menjunjung tinggi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan di Kampung sendiri. Jangka pembangunan Kampung juga dapat diamanahkan melalui Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2014 pasal 1 ayat 9 yang mengatur tentang kegunaan “Anggaran Dana Kampung yang di transferan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui Rekening Kabupaten/Kota”. Penganggaran Dana Kampung diperuntukan kepada Kampung untuk membangun Kampung -Nya. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi ikon utama dalam kemajuan Kampung selama enam-tujuh tahun terakhir ini. Forum Pengembangan Pembaharuan Kampung (FPPD) bersama para mitranya melakukan penelitian sekitar kurang lebih 40 Kabupaten di wilayah Timur Indonesia. FPPD menyimpulkan bahwa penerapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan

kurang efektif, berdasarkan Setiap tahunnya pemerintah pusat mengalokasikan Dana Kampung yang cukup besar untuk diberikan kepada Kampung. Pada tahun 2015, Dana Kampung dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Kampung mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. 2016 Dana Kampung dianggarkan Rp.46,98 triliun, 2017 mencapai Rp.60 triliun, 2018 masih menetap dengan Rp. 60 Triliun dan 2019 naik 70 triliun serta 2020 Rp.72 triliun. (Srimulyani Indrawati. Buku Pintar Dana Kampung. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>).

Menurut data di rilis oleh media (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong/id/data-publikasi/berita-terbaru/2943-kabupaten-maybrat-peroleh-blt-dd-terbesar.html>) dalam penjelasan Kepala KPPN Sorong, Juanda, di kota Sorong menjelaskan bahwa, “Tahun 2021 Kabupaten Maybrat mendapatkan total dana Kampung yang bersumber dari APBN yang lebih besar dari kabupaten/kota lainnya di Propinsi Papua Barat sebesar Rp. 157,28 miliar atau 80,54 persen dari pagu sebesar Rp195,38 miliar sejumlah 259 kampung”. Dari 259 Kampung di Kabupaten Maybrat, setiap desa mendapatkan sebesar Rp. 710. 424.000,”. Pemerintah Kampung Wayane juga mendapatkan suntikan Dana dari pemerintahan Pusat dengan jumlah sebesar Rp. 710.424.000 yang di transfer langsung dari APBN ke rekening Kampung Wayane melalui pemerintah Kabupaten Maybrat. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maybrat No. 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata kelola Dana Kampung di Kabupaten Maybrat. Tujuan dari PERBUP tersebut sebagai pedoman yang berkelanjutan yang berdasarkan tata kelola Dana Kampung sesuai dengan regulasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga peraturan pemerintah No.113 Tahun 2014 tentang tata Kelola dana Kampung.

Jumlah anggaran sebesar ratusan juta dari APBBN yang diluncurkan hingga dapat mendarat di Kampung Wayane dalam tahun 2022 ini, namun terlihat dalam konteks tata kelola yang belum sesuai. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, akan penulis menguraikan beberapa factor utama sebagai penghambat tumbuhnya pemerintah Kampung Wayane yang tidak sehat.

Kampung Wayane adalah Kampung yang dimana terletak dalam pemerintahan Kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat. Kabupaten Maybrat sendiri dapat memiliki 259 Kampung dan 1 (satu) kelurahan, serta 14 kecamatan. Dalam pengamatan penulis bahwa seluruh 259 Kampung di kabupaten Maybrat bukan sebagai subjek pembangunan melainkan obyek dalam pembangunan. Hal tersebut dapat menciptakan ketergantungan antara Kampung

dengan kepentingan para elit tertentu atau “Ketika Kampung mau maju, maka wajib memiliki hubungan patron klien antara elit tertentu dengan kepala Kampung serta badan perangkat Kampung (BPD). Seperti dalam penjelasan diatas bahwa, UU Desa merupakan catur sakti dalam membentuk desa bertenaga secara social, berdaya saing secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Ahmad Moquwen).

Praktek patron klien yang cenderung masif berakar dimulai dari tahun 2009, dimana kabupaten Maybrat mulai di mekarkan oleh pemerintah daerah Kota Sorong. Praktek patron klien kini menjadi stadium 4 (empat). Begitu banayak suntikan anggaran dana Kampung yang dapat diperoleh pemerintah Kampung Wayane, seperti PNPM Mandiri Respek, Koserin, BLT dan Dana Kampung. Fakata lapangan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh penulis bahwa, Kampung Wayane masih dalam kategori 3T Tertinggal, Termiskin dan Termarginalisasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemimpin yang cenderung hegemonic, dari Bupati hingga pada Kepala Kampung. Hal sedemikian tidak hanya terjadi pada Kampung Wayane, melainkan dapat juga dirasakan oleh 259 Kampung di Kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat.

Terdapat kepemimpinan yang hegemonic karena, dalam pengamatan penulis. Bahwa adanya relasi kuasa yang kental, sehingga kepala Kampung Wayane menjalankan aktifitas pelayanan Publik kepada Masyarakat Kampung Wayane terlihat kurang efektif. Terjadinya pemimpin (Kepala Kampung) yang cenderung hegemonic karena berdasarkan sebuah kesombongan atas posisi yang diduduki sebagi kepala Kampung. Di kabupaten Maybrat kurang lebih 13 Tahun dibentuknya Kabupaten Maybrat, dan usia kepemimpinan kepala Kampung Wayane sama usianya. Kedudukan kepala Kampung Wayane tidak dapat di pilih oleh masyarakat Kampung Wayane, melainkan dapat di angkat langsung oleh Bupati Kabupaten Maybrat (Drs, DR. Bernard Sagrim,.MM). Masyarakat Kampung Wayane hanya sebagi tameng politik yang setiap kali 5 (lima) tahun pesta demokrasi bergulir. Dari segi pengangkatan dan pemberian nota dinas, kepala Kampung memanfaatkan kewenangan tersebut untuk mengangkat pula badan perangkat Kampung (BPK) Wayane. Seluruh nya di tentukan langsung oleh elit tersebut, maka masyarakat Kampung Wayane hanyalah sebagai objek dalam pembangunan bukan sebagi subjek pembangunan yang ditargetkan oleh negara.

Nasib Kampung Wayane pada era kini, tidak terlihat beda seperti era reformasi. Dimana Pemeintah Pusa memanfaatkan Kampung sebagi objek dalam pembangunan, sehingga

bertubi-tubi Kampung di serang oleh kepentingan Negara yang sentralistik pada masanya. Dan kalau boleh penulis mengatakanya bahwa “UU No. 6 Tahun 2014 tentang Kampung dan UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 belum di realisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat.

Penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada factor-faktor penghambat dalam tata kelola dana desa di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis berkehendak mengangkat sebuah opsi sebagai Rumusan Masalah yaitu, “Bagaimana Problematika Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat Propinsi Papua Barat”.

## **C. Tujuan Penelitian.**

Ketertarikan pada judul Problematika Dalam Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Yang disertakan dengan ulasan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi factor-faktor utama yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Dana Kampung di desa Wayane sehingga Kampung Wayane masih tergolong dalam 3T (Tertinggal, Termiskin dan Termarginalisasi). Seperti dalam ringkasan rumusan masalah yang berfokus pada factor utama dalam pengegelolaan Dana Kampung di Kampung Wayane terdiri dari; Problematika Dalam Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Serta Faktor-Faktor Penghambat Seperti Adanya Patron Klien dan Relasi Kuasa antara kepala Kampung dengan Masyarakat Kampung Wayane.

Tujuan dari penelitian ini juga merupakan suatu pencerahan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui tata Kelola dana Kampung sesuai dengan Amanah konstitusi UU Kampung No.6 Tahun 2014 dan Peraturan dalam Negri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang struktur tata Kelola dana Kampung yang baik. Dan juga tata kelola Dana Kampung yang sesuai pada PERBUP Kabupaten Maybrat No.8 Tahun 2018.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Secara yuridis dengan hasil karya ilmiah ini, penulis tentunya berpijak kepada seluruh pembaca karya penulis yang berjudul “Problematika Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Wayane, Kecamatan Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat”. Dengan hasil gambaran tujuan penelitian diatas maka, penulis meminta kepada pembaca agar dapat menyimak seluruh isi karya ini dengan baik agar dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. Karya yang di sajikan dalam penelitian ini penulis dapat mengemas menjadi dua manfaat adalah sbagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis.**

Hasil karya yang dapat disajikan oleh penulis dan juga tentunya sebagai peneliti ini, penulis dapat menambahkan kehasaan pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu social. Hasil karya ini dari penulis mengharapkan dapat memberikan sebuah edukasi baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalm bidang tata pengelolaan Dana Kampung tanpa adanya intervensi elit local yang menyebabkan pertumbuhan Kampung yang tidak sehat. Terutama dalam peroses peraktek pola relasi kuasa yang menjadi ancaman utama yang kini terjadi di Kampung Wayane. Oleh sebab itu maka, penulis dapat memberikan edukasi dengan hasil karya ini kepada seluruh pembaca agar dapat menjadi dasar dimana pembaca cermati berbagi praktek relasi kuasa di setiap Kampung dimana pembaca berada.

##### **2. Manfaat Secara Praktis.**

Secara peraktik, penulis dapat memetic bebrapa dimensi utama yang merupakan manfaat prakti dalam hasil karya ini yang di sajikan kepada para pembaca adalah sebagai berikut:

- a Penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan sebagai referensi penelitian yang berikutnya, dimana mengali lebih dalam lagi tentang dampak intervensi elit local berupa konsep relasi kuasa yang di terapkan dalam metode pengelolaan Dana Kampung di setiap Kampung itu sendiri.

- b Penelitian ini juga merupakan sesuatu rujukan bagi pemerintah Kampung maupun masyarakat dalam mengetahui regulasi tata cara pengelolaan dana Kampung yang baik dan benar. Agar dapat mengunci ruang gerak para elit yang terlihat hegemonic sehingga mencederai tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane.
- c Manfaat yang berikut ini, diberikan kepada para mahasiswa yang terutama memiliki focus study tentang pemerintahan Kampung, agar dapat mengetahui alur tata mengelola Dana Kampung sesuai regulasi hukum yang dapat berlaku. Dan cermat untuk menata Kampung, dan tidak mencampuri berbagi kepentingan tertentu. Karena hal tersebut merupakan penyakit yang mencacatkan ilmu pengetahuan pemerintah Kampung.

#### **E. Literatur Review.**

Bagian penelitian terdahulu (*Literatur Review*) merupakan suatu konsep yang dapat memacu peneliti untuk melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah karya ilmiah. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti, penulis tidak dapat menemukan hasil karya yang memiliki judul yang sama dalam penelitian ini. Oleh sebab itu namun, penulis mengambilnya sebagai sebuah referensi yang identik untuk digunakan sebagai bahan dasar yang membantu memperkayai kajian ini. Maka menurut penulis dalam mengambil hasil karya dari para peneliti terdahulu yang instrument yang sama sebagai berikut yaitu:

*Pertama.* ZUHAQIQI (2020), Peran Pemerintah Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Kampung Salut Distrik Kayangan Kabupaten Lombok Utara). Penelitian tersebut dapat memperdalam tentang peran pemerintah Kampung Salut dalam pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan yang dimaksud adalah diantaranya; *Pertama*, meningkatkan kualitas kehidupan social masyarakat Kampung Salut. *Kedua*, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Salut dalam proses peningkatan pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan oleh pemerintah Kampung Salut untuk mengembangkan potensi Kampung dan memajukan Kampung.

Hasil penelitian tersebut dapat memiliki target utama dalam melihat peran pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat Kampung untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Dan upaya apa yang di gunakan oleh pemerintah Kampung dalam memperdayakan masyarakat Kampung tersebut. Hasil atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Zulhaqiq (2020) bahwa, proses pemberdayaan masyarakat Kampung Salut, Distrik Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dapat berjalan dengan baik. Hasil tersebut berdasarkan, peningkatan pembangunan masyarakat di Kampung tersebut terhitung dari tahun 2017-2020 mulai meningkat baik walu terlihat beberapa factor *ekonomi* masih sedikit terhambat dalam pemberdayaan masyarakat.

Persamaan antara penelitian yang di lakukan oleh Zulhaqiq dengan Judul “Peran Pemerintah Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Kampung Salut Distrik Kayangan Kabupaten Lombok Utara”, dengan penelitian dalam skripsi ini, dimana yang mengangkat Judul “Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat”. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam Peran pemerintah Kampung sebagai mana mestinya memanfaatkan segala sumber daya untuk memperdayakan Masyarakat Kampung. Kesamaan dalam kedua penelitian tersebut juga dapat memiliki metode penelitian pendekatan deskriptif (Kualitatif), yang terdiri dari Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zulhaqiq dengan Judul “Peran Pemerintah Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Kampung Salut Distrik Kayangan Kabupaten Lombok Utara”, dengan penelitian dalam skripsi ini, dimana yang mengangkat Judul “Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat”. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan antara lain yaitu; dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulhaqiq pada tahun 2020 yang lebih focus pada peran pemerintah Kampung Salut dalam peningkatan pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat. Dan penelitian dalam Skripsi ini terlebih focus mendevenisikan problematika tata kelola dana Kampung di Kampung Wayane, sehingga anggaran yang besar tidak berhasil dalam pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulhaqiq dengan Judul “Peran Pemerintah Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Kampung Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara” adalah pemberdayaan masyarakat adat

di Kampung Salut dari tahun 2017-2020 dapat berjalan berdasarkan patokan jenis petunjuk dalam pemberdayaan melalui pembangunan, namun dalam pemberdayaan ekonomi masih terlihat minim dalam peningkatannya. <http://repository.ummat.ac.id/1250/1/BAB%20I%2C2%2C3%29.pdf>

*Kedua.* Agustinus Sukarno (2021), *Governing Pemerintah Kampung (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap pengelolaan badan usaha milik Kampung (BUMKA) Kampung Wisata Di Kelurahan Belebaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Penelitian tersebut dapat memperdalam tentang; *Pertama*, kedudukan BUMKA di Kampung wisata yang tidak memfasilitasi kepentingan masyarakat. *Kedua*, kebijakan yang di buat oleh pemerintah Kampung dalam BUMKA untuk mengakses lapak penjualan disekitar tempat wisata, agar dapat lebih memprioritaskan masyarakat setempat. *Ketiga*, implikasikan pengelolaan BUMKA dalam pendapatan yang dikelola oleh BUMKA wisata yang tidak efektif dan efisien.

Hasil penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa, kebijakan pemerintah Kampung wisata di kelurahan Belebaran dalam merekrutmen pegawai BUMKA yang tidak merata. Oleh sebab itu untuk mendapatkan pemasukan Kampung melalui lapak penjualan yang tidak efektif sehingga pedagang kelas menengah social memanfaatkan factor tersebut untuk menjual dan lebih menikmati hasil di sekitar Kawasan wisata tersebut.

Persamaan antara penelitian yang di lakukan Agustinus Sukarno (2021), “Governing Pemerintah Kampung”. dengan penelitian dalam skripsi ini, dimana yang mengangkat Judul “Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat”. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam Peran pemerintah Kampung sebagai mana mestinya memanfaatkan segala sumberdaya untuk memperdayakan Masyarakat Kampung. Kesamaan dalam kedua penelitian tersebut juga dapat memiliki metode penelitian pendekatan deskriptif (Kualitatif), yang terdiri dari Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Sukarno (2021), *Governing Pemerintah Kampung*”. dengan penelitian dalam skripsi ini, dimana yang mengangkat Judul “Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat”. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan

antara lain yaitu; dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Sukarno yang lebih focus pada peran pemerintah Kampung wisata di Kelurahan Blebaran, dalam memberikan kebijakan tata kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKA) untuk membuka lapak di sekitar tempat Wisata di sekitarnya. Juga memfokuskan pada ketidak merataan dalam pengangkatan pegawai BUMKA di desa tersebut. Dan penelitian dalam Skripsi ini terlebih focus mendevenisikan problematika tata kelola dana Kampung di Kampung Wayane, sehingga anggaran yang besar tidak berhasil dalam pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Sukarno (2021), *Governing Pemerintah Kampung*” adalah kedudukan BUMKA Kampung Wisata Blebaran hanya menguntungkan warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II dimana lokasi wisata itu berada. Hal ini terlihat dari komposisi pengurus dan karyawan yang berkerja di BUMKA Wisata hanya warga dari Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II.

[http://repo.apmd.ac.id/1736/1/AGUSTINUS%20SUKARNO\\_17520252.pdf](http://repo.apmd.ac.id/1736/1/AGUSTINUS%20SUKARNO_17520252.pdf)

*ketiga.* Aras Liantika Rambu Mboni Utang (2021), *Kegiatan Pemerintah Kampung Sumberejo Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kampung Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten*. Penelitian tersebut dapat lebih focus pada dampak yang terjadi akibat pandemi Covid-19 adalah menurunnya ekonomi di Indonesia salah satunya di Kampung Sumberjo, Distrik Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

Hasil penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa, pada masa covid-19, masyarakat Kampung Sumberjo dapat terdampak secara langsung karena 85% masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan penanganan dari pemerintah Kampung Sumberjo kepada dampak Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal.

Persamaan antara penelitian yang di lakukan oleh Aras Liantika Rambu Mboni Utang (2021), *Kegiatan Pemerintah Kampung Sumberejo Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten*. dengan penelitian dalam skripsi ini, dimana yang mengangkat Judul “*Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat*”. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam Peran

pemerintah Kampung sebagai mana mestinya untuk menjaga, melindungi dan mengurus masyarakat-Nya. Kesamaan dalam kedua penelitian tersebut juga dapat memiliki metode penelitian pendekatan deskriptif (Kualitatif), yang terdiri dari Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Aras Liantika Rambu Mboni Utang (2021), Kegiatan Pemerintah Kampung Sumberejo Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kampung Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Penelitian dalam skripsi ini, dimana yang mengangkat Judul “Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat”. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan antara lain yaitu; dalam penelitian yang dilakukan oleh Aras Liantika Rambu Mboni Utang yang lebih focus pada peran pemerintah Kampung Sumberjo dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kampung yang merupakan terdampak dari serangan Covid-19. Dan penelitian dalam Skripsi ini terlebih focus mendevenisikan problematika tata kelola dana Kampung dio Kampung Wayane, sehingga anggaran yang besar tidak berhasil dalam pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aras Liantika Rambu Mboni Utang, bahwa pemerintah Kampung Suberjo belum mampu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dari dampak Covid-19.

<http://repo.apmd.ac.id/1809/1/LARAS%20LIANTIKA%20RAMBU%20MBONI%20UTANG%2017520056.pdf>

*Keempat.* Yunita Arne (2016), Faktor-Faktor Penentu Perencanaan Pembangunan Kampung Di Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Penelitian tersebut dapat lebih focus dampak yang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya; *Pertama*, mengetahui efektivitas perencanaan pembangunan, *Kedua*, analisis dampak kebudayaan merupakan factor penentuan perencanaan pembangunan Kampung. *Ketiga*, mengukur kontribusi kepemimpinan dalam pembangunan di Kampung.

Hasil penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa; (1) Rata-rata capaian efektivitas perencanaan pembangunan Kampung di Distrik Ayamaru Utara Kabupaten

Maybrat berada pada kategori “rendah” cenderung “sedang”. Kepemimpinan pemerintah dan nilai-nilai budaya secara bersama-sama (serentak) memberikan kontribusi positif bagi pencapaian efektivitas perencanaan pembangunan Perkampungan khususnya di Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat. (2) Kepemimpinan pemerintahan Kampung dalam kategori “rendah” cenderung “sedang”. Secara parsial, kepemimpinan pemerintahan Kampung berpengaruh positif terhadap pencapaian efektivitas perencanaan pembangunan Kampung khususnya di Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat. (3) Nilai budaya berada pada kategori “rendah” cenderung “sedang” atau cukup. Nilai budaya parsial atau budaya pemerintah Kampung organisasi berpengaruh positif terhadap pencapaian efektivitas perencanaan pembangunan Kampung khususnya di Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat.

Yunita Arne (2016), Faktor-Faktor Penentu Perencanaan Pembangunan Kampung Di Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. dengan penelitian dalam skripsi ini, dimana yang mengangkat Judul “Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat”. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan yang mengarah pada implementasi kebijakan dalam pembangunan di Kampung yang memiliki satu kedudukan wilayah Kabupaten Maybrat yang sama. Dan Juga kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini merupakan kerangka konseptual yang sedikit mirip seperti, dampak dari intervensi dari pihak luar terhadap hak Kampung dimana yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014 tentang Kampung.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yunita Arne (2016), Faktor-Faktor Penentu Perencanaan Pembangunan Kampung Di Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, dengan Penelitian dalam skripsi ini dimana yang mengangkat Judul “Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat”. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan antara lain yaitu; dalam penelitian yang dilakukan Yunita Arne menggunakan metode penelitian Kuantitatif melalui penyebaran Kuesioner, hingga pada analisis parseal. yang lebih focus pada pengaruh intervensi Budaya, Pemerintah kabupaten Maybrat, Lembaga pemerintah Kampung. Dari ke-3 aspek tersebut dapat berpengaruh secara positif dalam

perencanaan pembangunan Kampung di Distrik Ayamaru Utara. Dan penelitian dalam Skripsi ini terlebih focus mendevenisikan problematika tata kelola dana Kampung di Kampung Wayane, sehingga anggaran yang besar tidak berhasil dalam pemberdayaan masyarakat. Dan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif (Kualitatif), yang terdiri dari Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Yunita Arne “bahwa kepemimpinan pemerintahan dan nilai-nilai budaya merupakan faktor penentu tercapainya efektifitas perencanaan pembangunan Kampung khususnya di Distrik Ayamaru Kecamatan Maybrat Utara”.

<http://repo.apmd.ac.id/1809/1/LARAS%20LIANTIKA%20RAMBU%20MBONI%20UTANG%2017520056.pdf>

*Kelima.* Mia Eka Wahyuni Herry Yulistiyono (2021), Implementasi Tata Kelola Dana Kampung dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Penelitian tersebut dapat lebih focus pada implementasi dana Kampung dalam pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada tahapan tata kelola dana Kampung yang baik sebagai berikut; asas Transparansi, Partisipasi, akuntabelitas dan prinsip tata kelola Dana Kampung yang baik.

Hasil penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa; adanya ketidaksesuaian antara UU No.6 Tahun 2014 Tentang Kampung dengan PERBUP No. 2 Tahun 2020 tentang besarnya dana Kampung yang diberikan kepada Kampung. Terdapat juga kesimpulan yang ditarik implementasi pembangunan di Kampung Sumberingin dapat berjalan lancar karena adanya kontribusi masyarakat yang besar berupa, Partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pembangunan, dan partisipasi dalam pengawasan.

Perbedaan antara hasil penelitian dari Mia Eka Wahyuni Herry Yulistiyono (2021), Implementasi Tata Kelola Dana Kampung dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan penelitian dalam skripsi ini adalah, secara lokasi penelitian, dan titik focus yang dilakukan oleh Mia Eka Wahyuni Herry Yulistiyono, adalah bagaimana melihat prinsip-prinsip dalam implementasi dana Kampung serta fokus juga pada ketidaksamaan UU Kampung No.6 Tahun 2014 dengan

PERBUP No. 2 Tahun 2020 yang mengatur pembagian dana Kampung kepada setiap Kampung. Dan penelitian dalam Skripsi ini terlebih focus mendevenisikan problematika tata kelola dana Kampung di Kampung Wayane, sehingga anggaran yang besar tidak berhasil dalam pemberdayaan masyarakat.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mia Eka Wahyuni Herry Yulistiyono (2021), Implementasi Tata Kelola Dana Kampung dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan penelitian dalam skripsi ini adalah, sama-sama memiliki pendekatan Deskriptif (Kualitatif). Dan juga kesamaan dalam focus pembahasan tata kelola dana Kampung yang baik.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Mia Eka Wahyuni Herry Yulistiyono (2021), Implementasi Tata Kelola Dana Kampung dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dengan skripsi ini adalah merupakan focus pembahasan yang sama tentang bagaimana pemerintah Kampung dalam melakukan Tata Kelola Dana Kampung dengan Baik, agar dapat memajukan masyarakat sesuai dengan amanah UU No.6 Tahun 2014. <file:///C:/Users/user/Downloads/185-Article%20Text-524-1-10-20210929.pdf>

*Keenam.* Aris Zulfia Rifki (2017), Relasi Patron-Klien Masyarakat Pesisir Antara Juragan Dengan Nelayan Di Kampung Pangkah Wetan Distrik Ujung pangkah Kabupaten Gresik. Penelitian tersebut dapat lebih focus pada penyebab terjadinya Patron Klien masyarakat pesisir anatar juragan dengan Nelayan di Kampung Pangkah Wetan Distrik Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa timbulnya Relasi Patron Klien karena terjadinya ajakan dari juragan dimana dapat memberikan modal kepada para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan. Hubungan tersebut dapat terjadi atas kesepakatan bersama yang bersifat kontrak kerja antara masyarakat Nelayan dengan Juragan.

Perbedaan antara hasil penelitian Aris Zulfia Rifki (2017), Relasi Patron-Klien Masyarakat Pesisir Antara Juragan Dengan Nelayan Di Desa Pangkah Wetan Distrik Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan

skripsi ini adalah ditinjau dari sisi lokasi penelitian yang berbeda, dan focus pembahasan yang dapat membahas tentang relasi yang bersifat kontra kerja dari juragan dengan masyarakat Nelayan. Namun dalam skripsi ini melihat Patron Klien dalam prespektif penghambat dalam tata kelola dana Kampung di Kampung Wayane.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Perbedaan antara hasil penelitian Aris Zulfia Rifki (2017), bahwa dapat memiliki metode penelitian yang sama yakni Pendekatan Deskriptif (Kualitatif), dan juga bagaimana membahas soal Terjadinya Patron Klien antara di Kampung yang merupakan misi kepentingan individualism.

Kesimpulan antara penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah, patron klien dapat berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Dimana terdapat pembagian kelas menjadi dua yaitu kelas penguasa (Patron) dan kelas Masyarakat (Klin). [http://digilib.uinsby.ac.id/19349/1/Aris%20Zulfia%20Rifki\\_B75213038.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/19349/1/Aris%20Zulfia%20Rifki_B75213038.pdf)

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemerintah Kampung.**

Setiap manusia yang dapat hidup, tidak terlepas dari berbagai pelayanan pemerintah kepada manusia (Masyarakat). Dengan alasan bahwa hadirnya sebuah daerah otonom baru pada konteks wilayah dimana sekelompok orang dapat hidup berdampingan, merupakan sebuah institusi yang memberi kebijakan desentralisasi pelayanan public kepada masyarakat tersebut. Maka dalam kehadiran sebuah pemerintah bagi masyarakat pada kini, merupakan sesuatu keharusan dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap individu yang hidup bersama tau kelompok dapat tidak terlepas dari kebutuhan dalam pelayanan pemerintah. Oleh sebab itu maka, sebuah kehidupan masyarakat dalam kesehari-harian dapat dilihat kokoh dan erat dalam fungsi-fungsi pemerintahannya. (Sarundajang, (2002:5).

Suatu pemerintahan dapat diartikan secara luas merupakan sebuah alat kelengkapan negara yang memiliki Lembaga kekuasaan seperti Eksekutif, Legislatif dan Yuridis. Pemerintah juga diartika sempit seperti pejabat (pemangku kepentingan) seperti Lembaga

eksekutif, sebagai penyelenggara pemerintahan dan administrasi negara (Manan, 2001:101).

Ditinjau berdasarkan UU Kampung No. 6 Tahun 2014 tentang Kampung bahwa, Kampung merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum yang dapat memiliki Batasan wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat mengaku hak asal usul dan juga hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kampung dan Kampung adat.

Pemerintah Kampung memiliki ketegasan pada pasal 1 poin ke-1 yang terdapat dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, bahwa Kampung adalah satu-kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Kampungnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Kampung memiliki hak otonom yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dan merupakan unsur pemenuhan kebutuhan masyarakat Kampung itu sendiri. Terdapat regulasi setelah beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan yang berdasarkan paham baru tentang Kampung di NKRI.

Menurut Subang Hukum BPK (2015:15), perbedaan definisi Kampung dalam UU No.32 Tahun 2014 dan UU No.6 Tahun 2014 merupakan masyarakat hukum berdasarkan prakarsanya. Secara esensi mengenai Kampung dapat tidak berbeda dengan definisi yang menggambarkan pemerintah memberikan kebebasan bagi pemerintah Kampung untuk mengatur dan bertanggungjawab atas masyarakat yang hidup dalam kelompok masyarakat Kampung tertentu. Berikut ini terdapat tiga kewajiban pemerintah Kampung untuk mewujudkan tujuan pengaturan Kampung sebagai berikut:

1. Pelayanan public merupakan sebuah kewajiban untuk mencapai peningkatan mempercepat kualitas kesejahteraan umum bagi masyarakat.
2. Kampung bertugas untuk mengatasi kesenjangan social dan menjunjung tinggi kemajuan perekonomian masyarakat Kampung itu sendiri.
3. Menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Target Kampung memwujudkan hal tersebut maka Kampung berkewajiban untuk dapat melakukan pengelolaan alokasi Dana Kampung dengan berbagi strategi agar dapat mencapai kemajuan Kampung itu sendiri. Menurut Robert (2002:3), sebagai pendongkrak pembangunan di tingkat Kampung, pemerintah dapat memberikan kebebasan yang mutlak kepada Kampung untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Salah satunya pada bidang ekonomi yang berada pada Kampung itu sendiri, melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKA).

Menurut yang tertera pada UU Kampung No. 6 Tahun 2014 dapat menyatakan bahwa, elemen terpenting dalam Kampung adalah memperdayakan masyarakat secara ekonomi. Kewenangan desa diselenggarakan oleh pemerintah Kampung merupakan bagian dari penyelenggaraan roda pemerintahan Kampung. Kewenangan Kampung dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Kewenangan sebagai penyelenggara pemerintahan Kampung
2. Kewenangan melaksanakan pembangunan Kampung
3. Kewenangan melakukan peminaan terhadap masyarakat Kampung
4. Kewenangan dalam memperdayakan masyarakat Kampung

Kewenangan Kampung yang dapat dimaksudkan, juga dapat di tegaskan dalam UU Kampung No.6 Tahun 2014, terletak pada pasal 18 tentang Kewenangan Kampung sebagi berikut:

- a Kewenangan berdasarkan hak asal usulnya
- b Kewenangan berdasarkan local berskala Kampung
- c Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, atau kabupaten/kota
- d Kewenangan ditugaskan oleh pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan system perundang-undangan.

## **2.Tugas dan Fungsi Pemerintah Kampung.**

Tugas dan funngsi pemerintah Kampung, merupakan dimensi terpenting dalam organisasi pemerintahan Kampung. Oleh sebab itu berikut ini terdapat beberapa tugas dan fungsi perangkat Kampung sebagai berikut:

### **1. Tugas dan Fungsi Kepala Kampung.**

Kepala Kampung merupakan kepala pemerintahan Kampung, memiliki tugas dan fungsi adalah menyelenggarakan pemerintah Kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang, tugas kepala Kampung sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintah Kampung, penetapan peraturan Kampung, pembinaan pertanahan, pembinaan ketentraman dan kenyamanan serta pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti sarana dan pra sarana pedesaan serta pembangunan pada bidang Pendidikan Kesehatan.
- c) Pembinaan masyarakat sama halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam partisipatif masyarakat, sosial budaya masyarakat dan keagamaan serta ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat Kampung seperti sosialisasi dan motivasi, masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

## **2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kampung.**

Tugas sekretaris Kampung adalah, membantu kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan. Maka tugas tertentu di tegaskan pada ayat (2), permedagri No.84 Tahun 2015 tetnag susunan struktur organisasi pemerintahan Kampung. Tugas dan fungsi sekretaris Kampung sebagai berikut:

- a) Melaksanakan urusan tatausahaan berupa naskah, administrasi, surat, arsip, dan skdedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti, menata administrasi perangkat Kampung, penyediaan prasarana perangkat Kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan pengurusan keuangan seperi administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan Kampung, verivikasi adminidtrasi Kampung, dan administrasi penghasilan kepala Kampung, perangkat Kampung, (BPK), dan lembaga pemerintahan Kampung lainnya.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kampung, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.

### **3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan.**

Kepala urusan berfungsi untuk, berkedudukan sebagai urusan staf secretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Tugas kepala urusan sebagai berikut:

- a) Kepala urusan tata usaha umum memiliki fungsi sebagai melaksanakan urusan seperti tata usaha administrasi, naskah dan arsip serta ekspidisi.
- b) Kepala urusan keuangan, bertugas untuk, melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber pendapatan keuangan, administrasi pendapatan dan pengeluaran.
- c) Kepala urusan memiliki fungsi sebagai, urusan perencanaan, menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKA), menginventarisasi data pembangunan, monitoring, dan melakukan evaluasi program dan penyusunan laporan.

### **4. Tugas Dan Fungsi Kepala Seksi.**

Kepala seksi merupakan pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas untuk membantu kepala Kampung sebagai pelaksana operasional diantaranya sebagai berikut:

- a) Kepala seksi memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, Menyusun regulasi Kampung, pembinaan masalah, pembinaan ketentraman dan ketertiban, dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil Kampung.
- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
- c) Pembangunan sarana pedesaan, pembangunan Pendidikan, Kesehatan, sosialisasi motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

### **3. Pengelolaan Dana Kampung.**

Kemajuan sebuah negara, dapat diukur oleh kesejahteraan masyarakat Kampung. Kampung yang merupakan sebuah unit daerah otonom terkecil dari negara, provinsi, kabupaten/kota. Keberhasilan sebuah Kampung maka, kemampuan Kampung tersebut dalam mengelola Dana Kampung dengan baik. Dana Kampung yang dimaksud adalah Dana Kampung yang di dapatkan oleh pemerintah Kampung dari transfer langsung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBDN) dari pemerintah pusat. Penyaluran Dana Kampung merupakan suntikan Dana Kampung yang diteransfer langsung ke rekening Kampung melalui kabupaten/kota untuk memajukan sebuah pemerintah Kampung dengan masyarakatnya agar terlepas dari keterbeluguan 3T (Tertinggal, Terbelakang, Termiskin).

Untuk mencapai tujuan yang ditargetkan, maka pemerintah Kampung dituntut untuk mampu mengelola Dana Kampung dengan memanfaatkan sumber Dana Kampung lainnya. Menurut George RTerry pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya agar dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan daam kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, dalam pengaruh dan pengawasan hingga pada mencapai target tertentu.

Dana Kampung merupakan sumber pendapatan Kampung, maka dalam pengelolaan Dana Kampung untuk menghindari dari berbagai praktek-praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) oleh para elit Kampung sebagai berikut:

**a Transparansi.**

Transparasi merupakan, unsur keterbukaan informasi tentang masu dan keluarnya Dana Kampung, agar dapat di terima oleh masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang tata pengelolaan dana Kampung.

**b Akuntabelitas.**

Akuntabelitas merupakan suatu perwujudan dalam tata Kelola Dana Kampung yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku pengelola, untuk mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mempercepat pencaaian tujuan yang telah ditetpkan Bersama.

**c Partisipatif.**

Dalam konsep partisipatif, merupakan unsur yang tidak kalah penting untuk menghindari opini negative masyarakat terhadap pelaku pengelola Dana Kampung. Maka unsur partisipatif sangat penting untuk digunakan agar dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat Kampung untuk Bersama merealisasikan pelaksanaan Dana Kampung.

**d Tertib dan Disiplin.**

Pengelolaan keuangan (Dana Kampung) memerlukan sebuah ketegasan secara tertib dan disiplin sesuai dengan aturan (pedoman) yang telah disepakati bersama.

**4. Tahapan Pengelola Dana Kampung.**

Pengelolaan Dana Kampung dapat di atur dalam Peraturan Dalam Negri No.113 Tahun 2014 bahwa, peraturan tersebut memberikan (5) tahapan dalam pengelolaan Dana Kampung sebagai berikut:

**1. Perencanaan.**

Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan Daerah, terlebih khusus bagi sekretaris Kampung bahwa, Anggaran Pendapatan Kampung (APBKA) dapat di selenggarakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKA) tahunan berjalan. Hal tersebut dapat di sampaikan langsung oleh kepala Kampung kepada Badan Perangkat Kampung (BPK) untuk dibahas dan disepakati bersamaan oleh Musyawarah Kampung (MUSKAM). Hasil kesepakatan tersebut, dapat diajukan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu selambat mungkin 3 hari dari waktu disepakati agar sebagai bahan evaluasi.

**2. Pelaksanaan.**

Tahap pelaksanaan merupakan bentuk usaha yang perlu dilaksanakan oleh pelaku pengelola, setelah rencana terbentuk. Pemimpin berkewibawan untuk memimpin dan menggerakkan para staf atau bawahanya berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan untuk memwujudkan rencana yang tidak terlepas dari pendapatan Kampung.

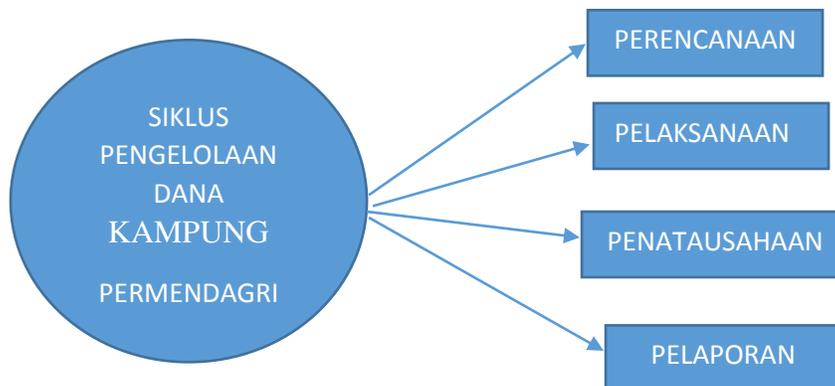
**3. Penatausahaan.**

Konsep penatausahaan dapat dilakukan oleh bendahara Kampung untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan Kampung. Tutup buku setiap akhir bulan dapat di tata secara tertib agar sebagai bahan pertanggungjawaban bendahara yang harus di lakukan oleh bendahara Kampung.

#### 4. Pelaporan.

Laporan adalah dimensi yang terpenting sebagai kualitas pertanggungjawaban. Realisasi DPBKA di laporkan oleh kepala Kampung kepada bupati/walikota merupakan hal tersebut yang wajib dilaporkan dalam tahapan pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan, dan laporan tahap akhir pada bulan jauari tahun berikut;

*Gambaran 1.1 Siklus Pengelolaan yang di maksudkan adalah:22*



*Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pengelolaan Dana Kampung.*

Ketentuan dari tahapan pengelolaan Dana Kampung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK-RI)No.205/2019 tentang skema penganggaran Dana Kampung dalam setahun menjadi III Tahap. Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 20%. Untuk waktu penyaluran sebagai berikut:

- a Tahap I dicairkan pada Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juli.
- b Tahap II paling cepat BulanMaret dan paling lambat minggu ke-4 bulang Agustus.

- c Tahap III Paling Cepat Bulan Juli.

## **5. Tujuan Pengelolaan.**

Unsur pengelolaan keuangan, tentunya dapat di butuhkan oleh seluruh wadah atau organisasi apapun. Karen Teknik pengelolaan keuangan membutuhkan manajemen yang baik dan memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan untuk mencapai hasil yang efektif dan memuaskan.

Dalam tehnik pengelolaan, sangat dibutuhkan ketrampilan dan ketelitian. Oleh sebab itu maka untuk pencapaian tujuan, dibawah ini terdapat beberapa tujuan pengelolaan mencapai sebagai berikut:

- a) Pencapaian pada visi dan misi Kampung
- b) Menjaga keseimbangan untuk mencapai tujuan Kampung yang berkaitan
- c) Dan mencapai hasil yang efisien dan efektifitas Kampung

Menurut Afifiddin (2010:3), menyatakan bahwa Langkah-langkah dalam pelaksanaan dapat didasari atas sebagaimana unsur yang tertera dibawah ini:

- a) Menetapkan sterategi
- b) Menentukan sarana dan batasan tanggungjawab
- c) Menentukan target yang mencakupi kualitas pada Batasan waktu
- d) Menentukan target dalam rencana dan tugas
- e) Menentukan standar evisien dan evektifitas kerja
- f) Menentukan nilai dan ukuran kerja
- g) Mengagendakan pertemuan

- h) Pelaksanaan
- i) Penilaian
- j) Mereview dengan berkala
- k) Dilakukan secara berkala

## **6. Patron Klien.**

Terjadinya interaksi atau pertukaran dari kedua peran khusus dari kelompok individu elit dalam instrument tertentu maka disebut dengan *Patron Klien*. Kalimat Patron Klien di kutip dari Bahasa Espanyol yaitu (*Patron*) individu yang dapat memiliki kekuasaan (Power Full) yang lebih tinggi dan (*Klien*) adalah individu yang dapat menawarkan dukungan kepada Patronnya. Pola tersebut Sering juga di tafsirkan sebagai kaum patronis dapat membantu klien-kliennya, dan terjadi relasi tersebut karena adanya pertukaran jasa yang berdasarkan kepentingan dari kedua belah pihak tersebut.

Dasar hubungan patron klien adalah merupakan jaminan social bagi substansi dan keamanan. Dalam hubungan tersebut terdapat sebuah pertukaran (Barter) yang merupakan suatu dasar pola hubungan antara patron dan klien, jika adanya kepentingan yang saling menguntungkan maka hubungan patron dan klien terus kuat dan berjalan hingga mencapai pada target yang direncanakan bersama. Oleh sebab itu maka, klien tidak terlihat lemah dalam meminta dukungan patron sesuai dengan fungsi klien tersebut. Jika dalam sebuah suku dan bangsa yang terdapat didalam adanya peraktek hubungan patron klien, maka terlihat bersifat structural dan dominative sehingga akan diterima sebagai suatu kebenaran dan akan diwariskan secara turun-temurun dalam generasinya.

Cristian Pelras menyebutkan bahwa, hubungan patron klien merupakan hubungan tidak sadar yang dapat terjadi atau di jalankan oleh setiap orang antara masyarakat yang di kategorikan sebagai (*Patron*) dengan sejumlah pengikutnya yaitu (*Klien*). Hubungan

antara kelompok orang yang berdasarkan jasa, yang dimaksudkan oleh penulis adalah ketergantungan antara kelin pada patron yang diimbalkan dengan perlindungan dari patron kepada klien.

James Scott mengemukakan bahwa, hubungan patron klien adalah sebuah hubungan elit yang di bangun secara spesialisasi antara dua belah pihak tersebut. Dua pihak tersebut memiliki status ekonomi lebih tinggi sehingga menggunakan pengaruhnya untuk melindungi dan memberikan manfaat baik pada pihak yang memiliki status social ekonominya lemah. Dari kedua hubungan tersebut dapat, klien dapat bekerja untuk patron dan juga memberikan jaza kepada patron sebagai sebuah imbalanya.

Dari imbalan yang saling di berikan oleh patron kepada klien dan juga klien kepada patron adalah sebagai berikut;

- a. Imbalan klien bias diberikan ke siapa saja yang memberikan hubungan baik kepadanya, serta perlindungan baginya.
- b. Sedangkan imbalan dari patron, hanya bias di berikan kepada individu yang memiliki status kastanya lebih tinggi.

Peter M. Blau mendefenisikan sebagai, sebuah hubungan yang di bentuk oleh Patron-Klien merupakan gubungan yang lebih menunjukkan pertukaran (*Exchange relationship*) yaitu dapat di gambarkat sebagai berikut:

- a. Terjadinya interaksi pertukaran antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan internal mereka.
- b. Untuk mendapatkan imbalan tersebut, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
- c. Pertukaran imbalan terjadi langsung antara alam, jaringan dan interaksi relative kecil. Serta kurang langsung dalam system social yang lebih besar.
- d. Dan pada konsep terakhir terdapat empat imbalan dengan frekuensi yang berbeda yakni Uang, Persetujuan social, dan penghormatan penghargaan dan kepatuhannya.

Dibawah ini terdapat ciri-ciri dari patron-klien;

- a. Adanya tidak seimbangan dalam status patron dan klien.
- b. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien dan kedudukan patron lebih tinggi dari posisi kedudukan yang dimiliki oleh klien.
- c. Ketergantungan klien pada patron karena terjadinya pemberian barang dan jasa dari patron kepada klien, sehingga klien merasa berutang budi kepada kebaikan patron.
- d. Utang budi tersebut menjadi ruang ketergantungan klien terhadap patron.

## **7. Relasi Kuasa.**

Sebuah kekuasaan yang juga diartikan sebagai powerful. Merupakan sebuah kekuatan bagi seseorang dalam menaklukkan merawat dan mempertahankan sebuah kekuasaannya pada daerah dimana dia berada. Hubungan relasi kuasa dapat di bentuk oleh para aktor-aktor tertentu yang memiliki kesamaan kepentingan. Dalam hubungan relasi kuasa terdapat hubungan sosial yang kuat dan mampu mengubah aktor lainnya.

Konsep Michael Foucault merupakan sebuah dimensi yang relasi kekuasaan, dan dimana ada relasi disitu juga ada kekuasaan. Kekuasaan yang di maksud merupakan sebuah hal yang menjadi kepemilikan atas barang dan jasa. Melainkan kekuasaan sebuah strategi yang berkaitan dengan praktek dalam satu ruang lingkup yang di dalamnya banyak posisi strategis yang saling berkaitan dengan kebijakan.

Foucault (2007) mendefinisikan bahwa, kekuasaan merupakan instrument praktek-praktek konkret yang menjadikan sebuah realitas berupa pola perilaku dan memproduksi ritual yang khas. Teori Relasi Kuasa merupakan produk dari Foucault yang berani dengan kutipannya bahwa: "Kekuasaan saya rasa harus dipahami pertama sebagai bermacam hubungan kekuatan yang imanen di bidang kekuatan itu berlaku, dan yang merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya; kedua, permainan yang dengan jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti mengubah, memperkokoh,

memutarbalikannya; ketiga, berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung sehingga membentuk rangkaian atau sistem atau sebaliknya, kesenjangan atau kontradiksi yang saling mengucilkan; terakhir strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan itu berdampak, dan rancangan umumnya atau kristalisasinya dalam lembaga terwujud dalam perangkat negara, perumusan hukum dan hegemoni sosial.”

Kutipan Foucault tidak sebatas pengertian atas kepemilikan, melainkan kekuasaan yang dimaksud olehnya adalah dapat di pahami sebagai sebuah hubungan kekuasaan yang memiliki sebagi saham (*PROPERTI*), dan hak istimewa yang dapat di gengam oleh sekelompok orang masyarakat yang ada. Terpisah dari hal tersebut, Foucault memandang sebuah kekuasaan sebagi keberagaman hubungan atau relasi yang memiliki medium berbeda dan tersebar seperti jaringan yang mampu menjalar pada ruang lingkup strategis tertentu. Jaringan-jaringan yang di maksudkan adalah sebuah pengikat yang mapu mengikat setiap individu maupun kelompok yang terisolasi dalam medium kekuasaannya.

Mex Weber juga mengemukakan tentang Kekuasaan dan juga di kutip oleh Lukas, bahwa kekuasaan selalu dikaitkan dengan berbagai bentuk dominasi. Dominasi yang di maksud adalah situasi ketika keinginan dapat di tingkatkan atau di manifestasikan berupa perintah pemerintah dari orang yang berkuasa dan juga mereka yang dapat membuat undang-undang. Kuasa yang dimiliki oleh pihak yang berwenag dalam memrintah untuk dapat mempengaruhi opini masyarakat umum sehingga sering perintah yang ada merupakan sebuah suruhan hati masyarakat tersebut.

Uraian diatas, merupakan pengantar, dimana peneliti memperkuat data dalam penelitian ini, sebab defenisi relasi kuasa yang merupakan sebuah dimensi dimana menjadi penghubung antara para elit local dalam menciptakan sebuah karakter pemimpin kepala Kampung yang terlihat hegemonic. Dan juga menjadi sebuah factor penyebab tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane yang tidak sehat. Hal tersebut terjadi karena elit pemerintahan Kabupaten telah memberikan jaminan kepada kepala Kampung dan pelaku pengelola Dana Kampung, sehingga proses pengelolaan dapat berjlan sesuai dengan kebijakan para elit tanpa dapat mengindahkan hasil musyawara desa (MUSKAM) yang disepakati Bersama antara masyarakat Kampung Wayane dengan para pengendalian pemerinah Kampung Wayane.

**a Relasi.**

Relasi merupakan sebuah hubungan antara individu dengan individu lainnya. Dimana relasi juga dapat memiliki fungsi yang terpenting bagi setiap elit yang ingin mencapai targetnya untuk meraih kekuasaan, maka elit dapat berkerja sama dengan kelompok lainnya untuk, membangun sebuah hubungan tertentu.

Dalam penelitian ini, relasi (Networking) merupakan hubunga yang di bangun oleh elit local, dari bupati dengan kepala-kepala Kampung dengan tujuan untuk mempertahankan tahtanya. Penelitian zippia tentang para pekerja di Amerikas Serikat, bahwa mencari relasi (Networking) merupakan sebuah jalan yang cepat menghubungkan antara pekerjaan dan manusia. Karen perekrutmen tenaga kerja berdasarkan relasi yang dominan.

**b Kuasa.**

Kekuasaan yang di gagas oleh Michhel Foucault tidak menjerumus pada kekuasaan kaum Burjois, dan Elitis penguasa meupun atribut-atribut lainnya. Sterategi dan fungsi yang diakibatkan oleh (*disposisi, maneuver, ktaktik dan teknik*). Kekuasaan tidak hanya menindas dan memeras masyarakat, tetapi kekuasaanjuga dapat menciptakan sebuah kebijakan baru. Sehingga Simon Philpott memilih sejalan dengan Fucault yang juga ikut mendevenisikan kekuasaan sebagi sesuatu yang sekedar memaksa, menyensor, memeras, menutupi dan menyembunyikan. Juga melakukan prduktifitas yang menghasilkan realitas baiknya bagi objek dan ritual kemerdekaan.

Michel Foucault melihat kuasa sebagi sebuah power ful yang di miliki oleh segelintir kelompok elit. Foucalut menegaskan bahwa, sebuah kekuasaan yang merupakan sesuatu yang bukan milik, melainkan menjadi penghubung kekuasaan dari elit terhadap kaum komunal. Dalam pengartiaan Kuasa menurut Foucault ada dua bagian yaitu;

- 1) Kekuasaan dapat di konsepkan menjadi sebuah rantai jaringan (relasi), dimana system relasi tersebut terhubung ke seluruh masyarakat.
- 2) Setiap orang tidak sebatas menerima kuasa sebagi sebuah media, melainkan kekuasaan juga dapat di tolak.

## 8. Elit.

Dalam pembangunan Kampung peranan elite berfungsi untuk membuat keputusan terhadap pembangunan Kampung. Pembangunan Kampung digunakan para elite untuk mempertahankan jaringan-jaringan atau kekuasaan di daerah desa. Peran elite dan lembaga Kampung bertujuan untuk mengontrol dan mengintervensi pembangunan Kampung, dalam kontrol dan intervensi elite sendiri terdapat unsur politis. Intervensi elite dalam pembangunan secara tidak langsung telah membuat pola hubungan yang terjadi karena kekuasaan elite tersebut, dimana hubungan tersebut menganggap bahwa elite telah memberikan kontribusi untuk masyarakat Kampung dan kepentingan masyarakat Kampung dan timbal baliknya untuk elite adalah masyarakat Kampung akan berkontribusi dan mendorong tercapainya tujuan elite untuk meraih kepentingan di daerah Kampung tersebut, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun untuk memenangkan elite dalam pemilihan umum.

Elit yang dimaksudkan dalam penelitian ini, adalah sekelompok orang yang dapat berkuasa dan memiliki fungsi kontroling terpenting dalam pengambilan kebijakan. Pengertian elit, dapat juga di artikan secara luas sebagai istilah sosiologis, dimana instrument kelompok yang dapat menduduki kasta tertinggi pada sebuah pemerintahan, politik, agama.

Vilfredo Pareto (1848-1923) menegaskan bahwa, yang Namanya Elit itu adalah golongan sekelompok orang yang tidak sama dengan individu dalam setiap lingkungan hidup. Pareto meyakini bahwa, sekelompok elit yang ada pada sebuah ruang lingkup yang sama, maka masyarakat akan mengikuti semua perintah para elit.

Tingkah laku para elit yang terlihat hegemonic dalam memimpin suatu pemerintah, maka terdapat adanya perbedaan antara golongan penguasa dan golongan Masyarakat Jelata. Maka dalam defenisi menurut, Gartano Mosca (1858-1941) bahwa, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat dua akelas yaitu, kelas yang menuguasai dan kelas dikuasai. Gagasan Mosca merupakan sebuah pendefenisian yang dapat secara real terjadi di pemerintahan Kampung Wayane. Pemerintahan Kampung Wayane menguasai

Masyarakat Kampung Wayane, dan Pemerintah Kampung Wayane di Kuasai oleh Elit pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat.

Elit konteks perdesaan dapat di bagikan menjadi dua bagian yaitu, Elit Formal Dan Elit Informal. Elit Formal adalah mereka yang dapat menduduki posisi kepala Kampung, dan RT/RW. Sedangkan Elit informal yang di maksud adalah mereka yang memiliki posisi luar dari pemimpin organisasi terpenting di dalam Kampung, seperti Guru, aparat Militer, Pengusaha, dan para Biarawan serta Biarawati. Peran elit local konteks perkampungan, merupakan penetua utama dalam kemajuan dan kemunduran Kampung tersebut, karena seperti yang di gagaskan oleh Pareto dan Mosca bahwa, elit adalah sekelompok orang yang dapat berkuasa dalam lingkungan hidup masyarakat.

Pada pengantar ini, merupakan sebuah gagasan yang dapat memberikan dua makna tentang elit yaitu;

**a) Elit Politik local.**

Elit local atau sering dikategorikan bahwa, elit plitik local dimana memiliki kedudukan dalam ruang lingkup kekuasaan dalam sebuah dimensi jabatan secara legislative dan eksekutif yang di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum secara demokratis. Posisi kedudukan jabatan tingkat local merupakan instrument yang dapat memberi dan mengabil kebijakan yang berdampak terhadap perkampungan yang merupakan subyek dalam pembangunan.

**b) Elit non politik.**

Elit non politik yan di maknai tentang, seseorang yang menduduki posisi jabatan strategis dan memiliki pengaruh dalam memerintah orang lain dalam kelingkupan bermasyarakat. Pada umunya bahwa, teori elit memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori:

- 1) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karena menduduki posisi untuk memerintah, dan
- 2) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Mosca dan Pareto membagi stratifikasi masyarakat dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (governing elit), elit yang tidak memerintah (nongoverningelite) dan massa umum (non-elit). Asas-asas umum dalam teori elit politik:

- a) Kekuasaan didistribusikan dengan tidak merata;
- b) Pada hakikatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya;
- c) Secara internal elit itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok;
- d) Elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (*self perpetuating*) dan keanggotaannya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sangatterbatas (*exclusive*),
- e) Karena keempat hal diatas, kelompok elit itu pada hakikatnya bersifatotonom, kebal terhadap gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.

Pendefensian elit ang di uraikan diatas, merupakan sebuah perlawanan anatar UU Kampung No.6 Tahun 2014. Dimana dengan ketegasan regulasi UU Kampung tersebut menjadi sebuah kemerdekaan yang di berikan oleh pusat kepada Kampung untuk mengatur dan mengelola Kampung sebagaimana mestinya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Interfensi para elit dapat menjadi sebuah ancaman terhadap Kesehatan Kampung Wayane dalam proses pertumbuhan. Oleh sebab itu dalam hal tata Kelola Dana Kampung, maka yang segala urusan Kampung tidak di berikan izin oleh UU Kampung atas intervensinya elit terhadap tata Kelola dana Kampung. Namun sejauh ini, sesuai uraian diatas, yang Namanya elit dapat massif terjadi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menelusuri dan memastikan pola dan arah tujuan dari para elit atas kebijakan yang semena-mena terhadap pemerintah Kampung Wayane.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian.**

Ruang lingkup penelitian guna mendeskripsikan Problematika dalam Tata pengelolaan Dana Kampung di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat sebagai berikut;

- 1) Penyaluran Dana Kampung terhadap kelima Pos atau Unit Penyelenggara
- 2) Problematika dalam perencanaan penggunaan dana Kampung
- 3) Problematika dalam Pelaksanaan Dana Kampung
- 4) Problematika dalam pengusahaan Dana Kampung
- 5) Problematika dalam pelaporan hasil Dana Kampung
- 6) Faktor Penyebab Tata Kelola Dana Kampung Yang Kurang Efektif.

## **H. Metode penelitian.**

Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian merupakan langkah yang di miliki oleh peneliti dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data, informasi, wawancara, dokumentasi pada data yang telah di dapatkan tersebut. Metode penelitian dapat di gambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur langkah dari data-data yang diperoleh, diolah dan di analisis.

Moleong (2007:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena social. Secara simple bahwa, penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengetahui situasi subjek melalui sikap, tingkahlaku, motivasi presepsi dan tindakan subjek. Atau bias diartikan bahwa, pendekatan tersebut tidak dapat di gunakan dalam pendekatan deskriptif (Kuantitatif).

### **1. Teknik penentuan Narasumber.**

Penentuan subjek adalah oaring (Narasumber) yang dapat memberikan informasi tentang alur penelitian sesuai masalah yang ditarget oleh penelitian dalam karya ini.

Menurut Sugiyono (2010:32), kegunaan subjek dalam penelitian adalah untuk memberikan informasi yang tepat sesuai dengan konteks masalah yang diteliti di lokasi penelitian.

Arikumanto (2014:21) teknik untuk menentukan informan dalam penelitian adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling*, karakter tertentu yang mapu di gunakan unruk memaparkan sampel populasi dan subjek yang di kutip sebagai sumber penelitian.

Uraian menurut fersi yang di paparkan diatas, maka subjek yang di tetapkan sebagai informan adalah pemerintah Kampung Wayane, Masyarakat Kampung Wayane, dan kelompok Intelektual dari Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat.

Sugiyono (2010:43), subjek dalam pendekatan metode kualitatif juga biasa di gunakan dengan informan (sumber informasi). Maka sugiyono menekankan bahwa, informan dapat di makanai dengan dua unsur sebagai berikut:

- a) Informan Pangkal adalah pengetahuan yang bersifat umum dan luas untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada peneliti untuk meneliti persoalan yang terjadi sesuai keahliannya secara rinci.
- b) Informan kunci, adalah subjek yang dapat memiliki keahlian tersendiri dalam memberikan informasi yang rinci berdasarkan pengalam hidupnya kepada peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis dapat menetapkan Masyarakat sebagai informan pangkal, karena masyarakat adalah penerima dana Kampung sesuai target pemerintah pusat. Maka peneliti menjadikan masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan informasi yang real kepada peneliti guna memperlancarkan dan membantu peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## **2. Deskripsi Informan.**

Terdapat nama-nama informan yang berhasil di ajak oleh peneliti untuk mewawancarai guna memperoleh data sesuai dengan tujuan peneliti. Dibawah ini terdapat deskripsi informan menurut, Nama, Jenis Kelamin, usia, Pendidikan, dan Pekerjaan, sebagai berikut;

### **Tbel 1.1. deskripsi Informan.**

| No | Nama              | Jenis Kelamin | Usia | Pendidikan | Pekerjaan                      |
|----|-------------------|---------------|------|------------|--------------------------------|
| 1  | Elisabeth Korain  | Perempuan     | 65   | SD         | Kepala Kampung                 |
| 2  | Kosmas Korain     | Laki-laki     | 41   | SMP        | Sekretaris Kampung Wayane      |
| 3  | Agustinus Korain  | Laki-laki     | 56   | SD         | Kasi Kesra                     |
| 4  | Paulus Korain     | Laki-Laki     | 34   | SMA        | Kaur Pembangunan               |
| 5  | Matias Semunya    | Laki-laki     | 43   | SMA        | Kaur Kasi Umum                 |
| 6  | Antonia Korain    | Perempuan     | 58   | S1         | Bendahara Kampung Wayane (PNS) |
| 7  | Paskalis Yumte    | Laki-Laki     | 38   | SMA        | Masyarakat                     |
| 8  | Falentinus Korain | Laki-Laki     | 52   | SMA        | Masyarakat                     |
| 9  | Apolonia Korain   | Perempuan     | 49   | -          | Masyarakat                     |
| 10 | Amandus Korain    | Laki-Laki     | 24   | Mahasiswa  | Mahasiswa                      |
| 11 | Stevanus Korain   | Laki-Laki     | 45   | SMP        | Masyarakat                     |
| 12 | Aknes Assem       | Perempuan     | 55   | SMA        | Masyarakat                     |
| 13 | Hironimus Yumte   | Laki-Laki     | 43   | SMP        | Masyarakat                     |
| 14 | Jhonatan Korain   | Laki-Laki     | 16   | SMA        | Pelajar                        |

*Sumber: data primer 2022*

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a) Jenis Data.

Data yang dapat di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Informasi yang di kumpulkan dalam bentuk kata-kata dan keterangan yang tidak menggunakan hitungan (angka), serta analisa statistic.

**b) Sumber Data.**

Dalam kontek ini adalah data primer, informasi yang di gunakan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti untuk mengukur efektifitas pelayanan public Kampung Wayane kepada masyarakat. Data sekunder yang di peroleh adalah berdasarkan data pengamatan peneliti dan juga profil pemerintah Kampung Wayane, sebagai berikut;

- 1) Kepala Kampung Wayane.
- 2) Sekretaris Kampung Wayane.
- 3) BPK Kampung Wayane.
- 4) Masyarakat Kampung Wayane.
- 5) Mahasiswa dan pelajar Kampung Wayane.

**4. Teknik Pengumpulan Data.**

Langka awal yang dilakukan oleh penliti dalam proses pengumpulan data adalah observasi. Metode observasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung pada tahap awal penelitian agar peneliti dapat mengumpulkan (belanja) berbagai masalah yang terjadi di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.

**5. Teknik Dokumentasi.**

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data tentang profil Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.

**6. Teknik Wawancara.**

Perolehan data lapangan, untuk membantu melengkapi sebuah karya, tidak dapat berjalan tanpa adanya metode Wawancara (Interview). Maka dalam penelitian ini penulis dapat menggunakan pendekatan Kualitatif maka, metode wawancara menjadi ujung untuk mengukur problematika pengelolaan Dana Kampung yang terdai di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat.

## **7. Teknik Analisis Data.**

Bagian analisis data merupakan, tahap pengolahan data dari hasil keseluruhan pengumpulan data yang dilakukan secara pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menurut (Arikonto, 2010) untuk memastikan sebuah kebenaran data yang dikerjakan, maka analisis data dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukan saat peneliti melakukan penelitian di lapangan.

Analisis data yang telah ditetapkan dalam penulisan karya ilmiah ini, merupakan data yang ditetapkan dan di analisis sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Analisis data ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan masalah yang terjadi di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat. Analisis data kualitatif berdasarkan metode pengumpulan data sebagai berikut;

### **1) Pencatatan Data.**

Bentuk data yang di analisis oleh peneliti berdasarkan data yang dapat diperoleh melalui hasil catatan, peta, skema, gambar, rekaman, dan memo.

### **2) Reduksi Data.**

Data yang di tuliskan dalam karya ini, merupakan hasil dari pengumpulan data di lapangan berdasarkan latar masalah yang terjadi di lapangan. Reduksi data yang di olah dapat membantu menggambarkan persoalan masalah dari kode aspek-aspek tertentu.

### **3) Display Data.**

Terjadinya pertumpukan data, karena di sebabkan oleh kurangnya pemberian informasi tentang gambaran umum. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan Display data. Definisi display data adalah, merupakan suatu aplikasi yang mampu

menghasilkan data berbentuk tabel, matriks, network, chart, atau grafik, dan lain-lain. Display data akan membantu penulis untuk mengolah data hingga tidak menciptakan pertumpukan data.

Reduksi data dalam bentuk tabel, yang dapat menghubungkan antara problematika pengelolaan dana Kampung di Kampung Wayane, dengan pengaruh atau juga penyebab yang dapat terjadi hingga pertumbuhan Kampung Wayane yang tidak berjalan sesuai dengan amanah UU Kampung No. 6 Tahun 2014.

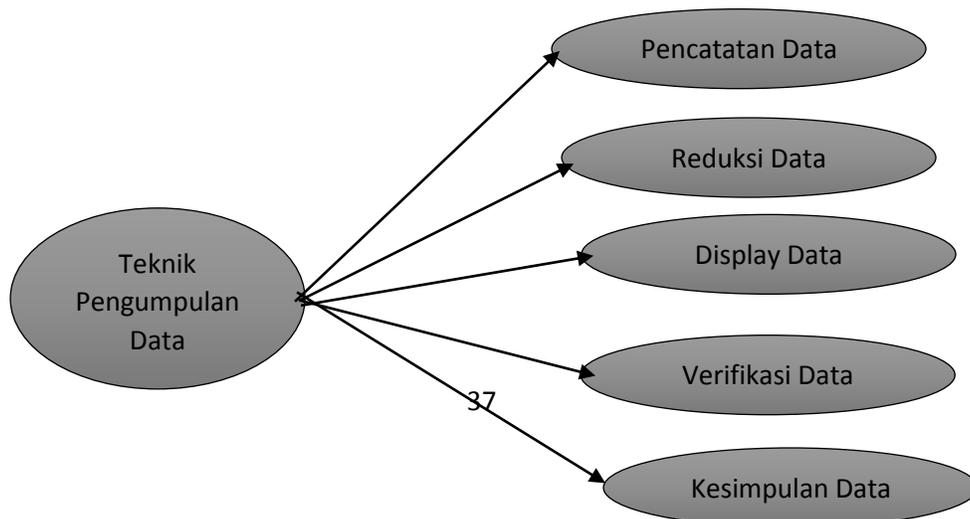
#### 4) Verifikasi Data.

Proses untuk pemverifikasian data yang diperoleh dari lapangan, penulis memiliki metode atau pola diantaranya; pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan lain-lain.

#### 5) Kesimpulan.

Teknik pengumpulan hingga pada analisis data dalam skripsi ini, penulis dapat menggambarkan analisis data Kualitatif berdasarkan (Arikunto, 2014: 57) sebagaimana mestinya dapat dilihat pada;

Gambar 1.2 Tahap Analisis Data Kualitatif



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Kampung Wayane, merupakan lokasi dimana penulis melakukan penelitian yang kedua kalinya. Tahap penelitian pertama penulis melakukan saat study kasus untuk memperoleh nilai Kuliah Kerja Nyata periode ke-54 dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kampung (STPMD “APMD”) Yogyakarta.

Alasan penulis lebih tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat karena dimana tempat tersebut adalah dimana penulis berasal. Target dari proses penelitian yang dilakukan untuk, mengangkat Nama Kampung Wayane ke kancan nasional agar dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya untuk menata pemerintah Kampung sesuai dengan interuksi UU Kampung No. 6 Tahun 2014 Tentang Kampung.

Kampung Wayane merupakan daerah otonom yang dimekarkan oleh pemerintah Kota sorong pada tanggal 3 Juni Tahun 2003. Saat Kampung Wayane di mekarkan, kabupaten Maybrat belum di bentuk. Hingga pada tahun 2009 telah di bentuk Daerah Otonom Baru “Kabupaten Maybrat”, maka Kampung Wayane menjadi bawahan pemerintah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Kampung Wayane adalah Kampung yang memiliki letak di bagian Utaranya Ibu Kota Kabupaten Maybrat (Kumurkek). Kampung Wayane juga merupakan Kampung yang memiliki nasibnya yang beridentik dengan 259 Kampung lainnya di Kabupaten Maybrat. Dimana nasib yang dimaksudkan adalah, belum mendapatkan kebebasan dari pemerintah Kabupaten Maybrat untuk mengatur dan mengurus nasibnya sesuai dengan produk UU No.6 Tahun 2014 tentang Kampung. Dimulainya pembentukan Kampung Wayane, kepala desa tidak dapat di pilih langsung oleh Masyarakat Kampung Wayane melainkan ditunjuki langsung oleh Bupati Kabupaten Maybrat. Pada Bab ini, akan penulis menguraikan atau mendeskripsikan gambaran umum tentang Kampung Wayane sesuai data ril yang di peroleh selama penulis melakukan observasi hingga penelitian. Karena roda pemerintahan Kampung Wayane belum dapat berjalan normal, sehingga Kampung Wayane hadir sebatas fisik tanpa adanya profil Kampung Wayane yang tersedia oleh organisasi pemerintahan Kampung Wayane. Oleh karenanya, dibawah ini terdapat pendeskripsian secara umum tentang Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat.

### **1. Deskripsi Pos (Lembaga) Penggunaan Dana Kampung**

Kampung Wayane merupakan Kampung yang mendapatkan dukungan dari pemerintah Pusat melalui suntikan dana yang dianggarkan melalui APBN. Pada bagian ini penulis dapat lebih focus dan khususkan membahas tentang penggunaan anggaran Dana Kampung di Kampung Wayane pada Tahun 2021. Hal ini juga dapat dirasakan oleh 259 Kampung lainnya di Kabupaten Maybrat. Namun seluruh Kampung masih dikategorikan 3T (Termiskin, Terbelakan, dan Termarginalisasi). Kampung Wayane mendapatkan bantuan dana Kampung pada tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp. 710.424.000 yang di transfer langsung dari APBN ke rekening Kampung Wayane melalui pemerintah Kabupaten Maybrat.

Dana Kampung dapat dicairkan 3 (tiga) tahap dalam 1 tahun. Berikut digambarkan dalam table 2.1

| No | Tahapan                         | Bulan            | Jumlah         |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|
| 1  | Tahap pertama (Awalan Tahun)    | Januari-Maret    | Rp.236.808.000 |
| 2  | Tahap Kedua (Pertengahan Tahun) | Juni-Agustus     | Rp.236.808.000 |
| 3  | Tahap Ketiga (Akhir Tahun)      | Oktober-November | Rp.236.808.000 |

*Sumber: Monografi Desa Wayane 2021*

Target penggunaan anggaran dana Kampung di Kampung Wayane pada tahun 2021, dapat disalurkan dalam 5 pos diantaranya sebagai berikut;

1. Pos Penyelenggaraan Pemerintah Kampung yang terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai beriku;
  - a) Operasional Pemerintahan
  - b) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan.
  - c) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah Kampung
2. Pos Pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari 6 (enam) unsur sebagi berimkut;
  - a) Pendidikan
  - b) Kesehatan
  - c) Pekerjaan dan tata ruang
  - d) Permukiman masyarakat
3. Pos Pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari 4 (empat) unsur sebagai berikut;
  - a) Keamanan dan ketertiban Kampung
  - b) Kebudayaan dan keagamaan
  - c) Lembaga masyarakat Kampung
4. Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 4 (empat) unsur sebagai berikut;

- a) Sector pertanian dan peternakan.
- b) Peningkatan kapasitas aparat Kampung.
- c) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d) Koperasi

5. Pos Penganggulangan bencana yang terdiri dari 1 (satu) unsur sebagai berikut;

- a) Penanggulangan Bencana.

Kelima pos yang merupakan instrument yang dapat menjadi program peningkatan Kampung Wayane dengan menggunakan Anggaran dana Kampung pada tahun 2021, dimana dapat disalurkan menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 2. 3 Jumlah anggaran dana Kampung yang di berikan Kepada kelima pos tersebut sebagaiberikut;

Tabel 2. 2 Jumlah anggaran dana Kampung yang di berikan Kepada kelima pos dari setiap Tahap.

| No. | Nama Pos                               | Jumlah Anggaran  | Sumber Dana          |
|-----|--|------------------|----------------------|
| 1   | Pos Penyelenggaraan Pemerintah Kampung | Rp. 47. 361. 600 | Dana Desa tahun 2021 |
| 2   | Pos Pelaksanaan pembangunan            | Rp. 47. 361. 600 | Dana Desa tahun 2021 |
| 3   | Pos Pembinaan kemasyarakatan           | Rp. 47. 361. 600 | Dana Desa tahun 2021 |
| 4   | Pemberdayaan Masyarakat                | Rp. 47. 361. 600 | Dana Desa tahun 2021 |
| 5   | Pos Penganggulangan bencana            | Rp. 47. 361. 600 | Dana Desa tahun 2021 |

*Sumber: Monografi Kampung Wayane 2021*

Data pada tabel 2.2 merupakan implementasi penyaluran Dana Kampung tahun anggaran kedalam pos yang telah di sepakati oleh pemerintah Kampung Wayane tahun anggaran 2021 bersama dengan Masyarakat pada saat melakukan MUSKAM.

## 2. Deskripsi batas wilayah Kampung Wayane.

Batasan Wilaya Kampung Wayane, dapat di lihat pada table 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Batas Wilayah Kampung Wayane

| No | Arah | Wilayah |
|----|------|---------|
|    |      |         |

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
| 1 | Utara   | Kampung Seya  |
| 2 | Timur   | Kampung Yarat |
| 3 | Selatan | Kampung Mosun |
| 4 | Barat   | Kampung Sire  |

*Sumber: Analisis Data Primer 2022*

### 3. Jumlah Data Penduduk Tetap (DPT).

Jumlah penduduk Kampung Wayane sebanyak 116 Jiwa, yang terdiri dari 56 Laki-laki dan 60 perempuan. Penduduk Kampung Wayane adalah masyarakat yang terdiri dari satau kesamaan antara suku, budaya, bahasa, kearifan local, dan cara bertani serta meramu yang sama. Namun dalam kontek spiritual atau keagamaan, dari total penduduk masyarakat Kampung Wayane yang berjumlah 116 jiwa merupakan pemeluk agam Kristen Katolik.

### 4. Aspak Geografis.

Letak Kampung Wayane secara umum dapat di gambarkan bahwa, Kampung Wayane dari sisi geografisnya dapat di kategorikan sebagi dataran tinggi dengan ukuran (MDPL)  $\pm$  1668 M dari permukaan air laut. Dan Kampung Wayane tergolong berada pada iklim hutan hujan tropis.

### 5. Luas Wilayah.

Adapun luas wilayah yang di miliki oleh pemerintah Kampung Wayane, Kecamatan Aifat Utara, Kabupaten Maybrat adalah sebesar  $\pm$ 1.200 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari lebar mencapai  $\pm$ 700 m dan panjang  $\pm$ 500 m. luas tanah yang di gunakan untuk membangun pemukiman masyarakat serta fasilitas umum sebesar  $\pm$ 900 m, maka sisa tanah milik pemerintah Kampung Wayane sebesar  $\pm$ 300 m.

### 6. Kondisi Demografi

#### a. Laju pertumbuhan penduduk di Kampung Wayane.

Penduduk Kampung Wayane dapat memiliki penduduk awal mulai di bentuk Kampung Wayane sebanyak 75 Jiwa, hingga pada tahun 2021 dari data Sensus penduduk Pemerintah Kabupaten Maybrat menjadi bertambah menjadi 116 jiwa, yang

terdiri dari 56 Laki-laki dan 60 perempuan. Dalam pertumbuhan penduduk Kampung Wayane yang semakin meningkat dengan drastis maka pemerintah Kampung Wayane, sedang mencoba berkomunikasi dengan pemilik tanah adat untuk memperlebar atau menambah ukuran guna menampung penduduknya.

b. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kampung Wayane.

Jenis pekerjaan yang di miliki oleh masyarakat desa Wayane, Kecamatan Aifat Utara, Kabupaten Maybrat. Dapat di lihat pada table berikut;

Tabel 2.4 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kampung Wayane

| No | Jenis pekerjaan           | Jumlah   |
|----|---------------------------|----------|
| 1  | Pegawai Negri sipil (PNS) | 10 Orang |
| 2  | Petani                    | 51 Orang |
| 3  | Pengangguran              | 25 Orang |
| 4  | Mahasiswa                 | 7 Orang  |
| 5  | Pelajar (SMP-SMA/SMK)     | 23 Orang |

*Sumber: Analisis Data Primer, 2022*

## 7. Sumber Daya Alam (SDA).

Kondisi topografi Kampung Wayane memiliki potensi daerah dataran tinggi. Kampung wayane adalah salah satu Kampung di kabupaten Maybrat yang memiliki tiang penyanggang ekonomi kerakyatan yang bergerak pada sector pernyataan. Dalam pengamatan penulis dalam hemat tumbuhan atau tanaman yang dapat perlu di kembangkan untuk membantu di kembangkan untuk membantu meningkatkan penghasilan bagi para petani di Kampung Wayane sebagai berikut: singkong, ubni-ubian, kacang hijau, dan jenis sayur-sayuran yang meliputi kangkung, sawi, kol, labu dan sebagainya.

Roda kehidupan masyarakat Kampung Wayane tidak dapat terlepas dari sumber daya alam. Yang di miliknya, oleh sebab itu sebagian besar kehidupan masyarakat setempat di tentukan oleh alam. Alam telah menyediakan jenis makanan berupa hewan, tumbuh-tumbuhan dan minuman seperti air bersih pegunungan serta lainnya. Dalam pengamatan penulis nkehidupan di Kampung Wayane sangat nyaman, tidak ada uang tetap happy asalkan rajin mencari makanan di hutan.

## **8. Aspek Social Dan Ekonomi.**

Dalam kondisi kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Wayane, distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan standar 20% dari masyarakat Kampung di pulau jawa. Kehidupan sosial masyarakat Kampung Wayane sangat baik, kehidupan mereka selalu di bawah kendali kekeluargaan yang berdasarkan klen marga di mana asal usul mereka. 100% seluruh penduduk Kampung Wayane merupakan satu asal usul yang sama, oleh sebab itu dalam kehidupan sosial mereka terlihat jauh lebih baik berdasarkan kondisi sosial yang di bawah kendali bahagia hidup seadanya. Bagi penulis bahwa sebuah kehormatan yang di peroleh di lapangan adalah pelajaran hidup yang sederhana tanpa mengeluh dalam hidup situasional yang berbeda. Karena dalam penulis hidup tidak untuk apa-apa, akhir dari kehidupan adalah kematian.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kampung Wayane, seperti yang di utarakan penulis di atas bahwa jika di bandingkan antara Kampung Wayane dan Kampung di pulau jawa maka Wayane hanya memiliki 20% saja. Seluruh kehidupan ekonomi bahkan pemenuhan ekonomi rumah tangga secara alami. Seharusnya masyarakat Kampung Wayane sudah bias bersaing dengan masyarakat di pulau Jawa bahkan lebih juga. Pemerintah memberikan Dana Kampung yang memiliki nilai triliun bagin semua Kampung di Indonesia, dan Kampung Wayane juga mendapatkan. Namun tidak adanya peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik, tidak ada pembiayaan pendidikan yang baik, sehingga masyarakat berswadaya diri mereka dan anak-anak mereka yang sendang menempuh pendidikan tingkat SD- perguruan tinggi. menurut hemat penulis dalam melihat factor penyebab sebagi berikut:

- a) Pengaruhnya praktek Elit Kampung, hingga melahirkan kepemimpinan yang hegemonic.

- b) Kepala Kampung dan BPK Kampung Wayane dapat lebih mengelola Dana Kampung yang sesuai dengan program kepentingan elit tertentu.
- c) Kelalaian pemerintah daerah dalam mem, berikan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada pelaku pengelolaan Dana Kampung, tentang tata kelola Dana Kampung yang baik sesuai prosedurnya.
- d) Kelemahan Negara dalam mengawasi proses pengelolaan Dana Kampung, sehingga praktek kepemimpinan yang hegemonic dapat di cegah dan mntransformasi kembali tata kelola Dana Kampung yang baik.

## **9. Aspek Budaya Dan Kearifan Local.**

Manusia memiliki kehidupan yang kuat ketika memiliki jati diri (kebudayaan dan kearifan lokal) yang kuat. Identitas bagi masyarakat Maybrat, terlebih kusus Kampung Wayane dapat memiliki kesamaan dalam kebudayaan, bahasa, spiritual, makanan local, dan masyarakat Kampung Wayane juga memiliki kearifan local yang sama seperti; cara meramu, mengolah makanan, dan cara meramu yang sama.

## **10. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kampung.**

Ekonomi desa adalah elemen terpenting yang harus di perhatikan dan wajib ditindak lanjuti oleh otoritas Kampung Wayane. Pada taraf usia ke-19 tahun pemerintah Kampung Wayane, keadaan ekonomi masyarakat Kampung Wayane tampak sedikit maju dari sebelum adanya pemerintah Kampung Wayane.

Pemerintah Kampung Wayane, tdiak memiliki taraf perkembangan ekonomi masyarakat yang sehebat nya Kampung di pulau Jawa. Namun kondisi ekonomi masyarakat Kampung Wayane masih tergolong dalam kategori sedang.

Kondisi umum antara sosial dan ekonominya dapat di utarakan pada bab iii gambaran umum pemerintah Kampung Wayane dan tepatnya pada poin ke-8. Dan pada bagian ini, penulis sedikit memperdalam sesuai dengan hasil kumpulan data di lapangan sebagai berikut;

### **A. Pendapatan Masyarakat.**

Penduduk Kampung Wayane yang terdiri dari 116 Jiwa dan 30 Kepala Keluarga (KK) berada pada kelompok yang kategori 95% petani. Menurut data yang diperoleh dari

responden, bahwa total pendapatan per bulan tidak menentu (terkadang ada dan tidak ada). Hal tersebut dapat disebabkan oleh sumber pendapatan yang hanya berasal dari hasil jualan hasil pertanian dan sayur Pakis.

Pendapatan tambahan yang bisa membengkak hasil pendapatan hanya bersumber jika ada kesempatan dari pemerintah Kampung, Kabupaten untuk memberikan sebuah Proyek, maka sedikit meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung Wayane. Namun sumber proyek yang didapatkan dari pemerintah, masih bersifat politisasi. Dalam konteks tersebut, hampir dirasakan oleh seluruh 259 Kampung di Kabupaten Maybrat. Karena kehadiran proyek berdasarkan hasil dari dukungan politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati) dan Pemilihan Legislatif (DPRD) Kabupaten Maybrat.

Maka berdasarkan hasil penelitian, pada konteks pendapatan masyarakat Wayane dalam nilai ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.5 Pendapatan masyarakat (Profesi Petani)

| No | Sumber Pendapatan            | Jenis                                | Harga   |
|----|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1  | Jualan Hasil Pertanian       | Ubi                                  | Rp. 50.ribu/1Kg   |
| 2  | Jualan Sayur                 | Pakis, Gohi, dan sayur lainnya       | Rp. 10.ribu/1 Kg  |
| 3  | Jualan buah-buahan           | Rambutan, pisang, pepaya dan lainnya | Rp. 20.ribu/1Kg   |
| 4  | Hasil perternakan            | Babi                                 | Rp. 20-30 jut/1 tahun lama piara                          |
| 5  | Hasil perternakan            | Ayam                                 | Rp. 100 Ribu/1 ekor                                       |
| 6  | Jualan bahan material proyek | Material                             | Rp. 1 Juta/ 1 rit truk pasir = 6 2/5 m <sup>3</sup>       |
| 7  | Tenaga kerja                 | Borong                               | Rp. 75 Ribu/Hari  |
| 8  | Tenaga kerja                 | 1 set proyek                         | Rp.5-10 juta. Dan tergantung pada volume proyek tersebut. |

Sumber: Analisis Data Primer, 2022

Pendapatan yang diperoleh berdasarkan tabel 4.1, tidak menentu pada waktu (tergantung musiman) waktu panen dan waktu adanya proyek. Jika ada pertanyaan; jika pendapatan yang tidak menentu sedemikian, kehidupan ekonomi masyarakat Kampung Wayane di tunjangi oleh apa?. Maka jawaban tersebut menurut Bapak. Agustinus Korain,

“kami bersyukur atas ciptaan Tuhan yang indah bagi kami. Kami diciptakan dengan unik dan hidup diatas sumber daya alam kami yang kaya. Jika ada pertanyaan sedemikian silahkan bertanyalah kepada orang diluar Papua. Karena Orang Papua tidak bisa hidup hanya bergantung dengan uang, karena kami masih bisa dihidupi oleh Sumber Daya Alam Kami”. Hasil wawancara dengan masyarakat lainya juga hampir mirip, maka kesimpulan dari poin tersebut bahwa. Walau roda pemerintahan Kampung Wayane dan Kabupaten Maybrat jalan seperti yang dijelaskan pada Bab-Bab diatas, Masyarakat Wayane adalah masyarakat yang kreatif dengan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tanpa bergantung pada pemerintah Kampung Wayane dan Pemerintah Kabupaten Maybrat.

## **B. Pendapatan Pegawai Negri Sipil (PNS) .**

Pegawai Negri Sipil yang merupakan aset penduduk Kampung Wayane kurang atau lebih sedikit jumlah dibandingkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Maka dalam kontek ini, penulis tidak terlalu panjang mengulasnya.

Sumber pendapatan PNS, merupakan sumber jelas dari Negara. Pendapatan yang di peroleh dari PNS dapat di lihat pada tabel berikut;

Tabel 2.6 pendapatan PNS

| No | Status         | Sifat pendapatan | Jumlah                            |
|----|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 1  | PNS            | Menetap/bulanan  | Rp 1-2 Juta an/bulan              |
| 2  | Petani         | Tidak menetap    | Rp. 200-500 tergantung musiman.   |
| 3  | Pekerja proyek | Tidak menetap    | Rp.5-10 Jutaan tergantung musiman |

*Sumber: Analisis Data Primer, 2022.*

Dari data tabel 2.5 menunjukkan bahwa, pendapatan PNS di Kampung Wayane dapat membedakan kelas ekonomi dengan Masyarakat non PNS (Petani). Namun dalam tabel 2.5 terdapat pendapatan tambahan dari kelompok PNS di Kampung Wayane. Hitungan pendapatan yang diperoleh masyarakat yang berstatus PNS di Kampung Wayane semakin bertambah.

Dari hasil kumpulan data di lapangan, penulis mendapatkan data dari kelompok PNS bahwa, biaya kehidupan yang semakin mahal, dalam 1 bulan biaya kehidupan dengan gaji tidak cukup. Dari hasil wawan cara bersama Ibu Antonia Korain yang berposisi sebagai Kepala Sekolah Dasar YPPK St. Agustinus Mosun dan juga sebagai Bendahar Kampung Wayane menyampaikan bahwa, “kehidupan PNS hampir sama dengan kehidupan Masyarakat non PNS. Kami harus cari uang atau penghasilan tambahan juga untuk biaya kehidupan rumah tangga dan juga untuk biaya pendidikan anak kami yang sedang berpendidikan. Maka kami harus berjualan sayur, ubi, buah-buahan dan lain sebagainya untuk menambah pendapatan kami. Dan juga di akhir-akhir ini juga, kami PNS juga sedikit mengalami keterpurukan dalam proses kelancaran hak kami sebagai pengabdian negara”.

## 11. Pemerintah Kampung Wayane.

Pemerintah Kampung Wayane di mekarkan pada tanggal 29 juni tahun 2003 dari kota sorong. Kurang lebih 6 tahun Kampung wayane di pindahkan masuk pada wilayah administrasi daerah otonom baru (DOB) kabupaten maybrat yang di mekarkan pada tahun 2009. Hingga sekarang Kampung Wayane berusia 19 tahun. Bentuk pemerintah sesuai yang di amati oleh penulis bahwa,masih tetap jika di bandingkan dengan pemerintah Kampung lainnya Kampung wayane menduduki 20% dari level kemajuan .karena di lihat pada konteks sebagai berikut:

Berdasarkan pada UU No.6 Tahun 2016 pasal 1 Ayat 3,menyatakan bahwa kepala Kampung merupakan pemerintah desadan di bantu oleh perangkat Kampung untuk penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. Pemerintah Kampung juga dapat di lengkapi dengan badan struktur dari kepala Kampung hingga kaur dan kasi.

Fakta lapangan yang di temukan oleh penulis, di lokasi penelitian ( Kampung wayane) terdapat banyak hal yang menjadi pengganjal kemajuan pemerintah Kampung wayane.

- a) Jabatan kepala Kampung di angkat langsung oleh Bupati Kota Sorong hingga Kabupaten Maybrat. Bagian ini terjadi karena, pemerintah daerah kabupaten dapat memanfaatkan potensi kampung wayane dalam kepentingan politiknya. Kepala Kampung wayane di angkat oleh bupati berdasarkan jaza dari kerja politik bersama kandidat terpilih. Hingga pada tahun 2019 di gantikan oleh istrinya karena beliau telah meninggal dunia. Jabatan kepala kampung tidak pernah di pilih oleh masyarakat atas UU No.6 Tahun 2004 & permendagri N0.112 Tahun 2004.
- b) Kepala Kampung dan sekretaris tidak bertempat tinggal di Kampung wayane. Kepala desa tinggal di Kampung tetangga ( Ayawasi)  $\pm$  jarak yang di tempuh 8000 M<sup>2</sup> sekretaris bertempat tinggal di Kampung fonatu  $\pm$  jarak yang di tempuh 8000 M<sup>2</sup>.
- c) Fasilitas kantor Kampung wayane yang tidak layak di pakai. Fasilitas merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan roda pemerintah kampung. Sesuai pengamatan penulis, hanya terdapat 1 (satu) unit rumah memiliki ukuran  $\pm$  panjang 9m x lebar 7m.1 ( satu) buah aula dan 2 (dua) buah kamar, dan 1 ( satu) buah meja, dan 2 buah kursi, dan 1 papan struktur organisasi pemerintah Kampung

wayane. Depan halaman memiliki luas panjang 2m x lebar 3m,terdapat papan nama kantor Kampung dan 1 tiang bendera.

- d) Waktu kantor di buka pada saat adanya pencairan dana kampung,dan keuangan lainnya. Sering masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik dari tingkat Kampung. Pengurusan KTP, KK, Akta, dan lainnya paling cepat memakan waktu 1 (satu) hinggah 2 (dua) tahun untuk mendapatkan rekomendasi dari Kampung wayane.

Dalam hail ini ,penulis tidak mengukur kemampuan secara individu dari kepala kampung dan perangkat kampung. Penulis lebih dapat mengukur kurangnya pemahaman yang layak oleh kepala daerah kabupaten maybrat. Serta seluruh OPD terkaitnya. Dalam konteks ini mereka tidak mampu memahami setiap bidang yang di berikan tanggung jawab untuk bekerja sebaik mungkin sesuai dengan standar yang maksimal, dan mereka juga di gaji oleh negara republik indonesia (NKRI) . ketidak pahaman tersebut dapat menyebabkan resiko yangt besar bagi 259 Kampung yang berada di bawah garis komando Kabupaten Maybrat.

## 12. Sarana Dan Prasarana Kampung Wayane.

Sarana dan prasarana di Kampung Wayane, dapat di gambarkan padaTebel berikut ini;

Tabel 2.7 Sarana dan pra sarana umum Kampung Wayane;

| No | Nama               | Jumlah | Aktif/Tidak Aktif |
|----|--------------------|--------|-------------------|
| 1  | Lembaga pendidikan | -      | -                 |

|   |                        |   |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
|   | (TK,SD,SMP,SMA dst)    |   |                        |
| 2 | Gereja (tempat Ibadah) | - | -                      |
| 3 | Kantor Kampung         | 1 | Tidak menentu          |
| 4 | Posyandu               | 1 | Tidak aktif            |
| 5 | Pos Ronda              | 1 | Tergantung situasional |
| 6 | MCK                    | 1 | Aktif                  |
| 7 | TPU                    | 1 | Aktif                  |
| 8 | Pasar                  | - | -                      |

*Sumber: Analisis Data Primer, 2022*

Menurut penjabaran data pada tabel 2.6 diatas merupakan. Sarana umum yang dapat dimiliki dan belum dimiliki. Sarana yang di katakan aktif, merupakan selalu di gunakan oleh masyarakat Kampung Wayane sesuai kebutuhannya. Yang dikatakan tidak aktif menjelaskan bahwa, ada bangunanya namun tidak dimanfaatkan (tidak digunakan) oleh pemerintah Kampung Wayane. Sedangkan yang kosong, merupakan tidak tersedianya bangunan tersebut di Kampung Wayane.

### **13. Struktur pemerintahan Kampung Wayane.**

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 sebagai pelaksana UU Kampung No 6 Tahun 2014, maka pemerintah Kampung Wayane dapat menyusun struktur badan organisasi pemerintahan Kampung Wayane sebagai berikut.

Gambar 2.1 Susunan Struktur Badan Perangkat Kampung Wayane

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN.**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut hasil uraian dari bab pertama hingga pada bab ke-3 dalam skripsi ini, penulis telah memfokuskan arah penelitian yang dapat memiliki data tentang “Problematika Tata Kelola Dana Kampung di Kampung Wayane, Kecamatan Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat” diatas, dapat dibahas dan disimpulkan sebagai berikut;

#### **1. Penyaluran Dana Kampung terhadap kelima Pos atau Unit Penyelenggaraan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh berdasarkan instrumen informan diatas Penyaluran Dana Kampung terhadap kelima Pos, maka penulis berkesimpulan mengabarkan proses penyaluran dana kepada kelima pos dari Dana Kampung di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat sebagai berikut;

- 1) Kelima pos yang bentuk pada tingkat Kampung sebagi ruang dimana penyaluran dana Kampung dari bendahara kepada pos-pos tersebut untuk megimplementasikan pembenggunaan dan pemberdayaan bagi masyarakat dapat berjalan tidk sesuai, karena berdasarkan uraian informan diatas maka, hal tersebut dapat berpengaruh pada turunya semanag masyarakat yang di

percayaikan dalam pengelolaan pos-pos tersebut dalam mendukung pembangunan di Kampung Wayane.

- 2) Anggaran dapat di salurkan langsung oleh bendahara kepada obyek tertentu yang di kerjakan, tidak melalui pos-pos yang di bentuk. Hal tersebut dapat menjadi keraguan masyarakat Kampung Wayane dalam mengambil bagian pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Kampung Wayane.

## **2. Perencanaan**

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh berdasarkan instrumen informan diatas pada tahapan perencanaan, maka penulis berkesimpulan mengabarkan proses perencanaan penggunaan Dana Kampung di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.

Musyawarah Umum Kampung (MUSKAM) adalah sebuah forum dimana mesyarakat dapat mengusulkan dan membahas progeram yang menjadi kebutuah masyarakat itu sendiri. Dan juga adanya forum tersebut merupakan bagian transparansi pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung serta merawat partisipasi masyarakat dalam semangat membangun Kampung untuk Indonesia.

Progeram pembangunan Kampung Wayane yang telah disepakati bersama, merujuk kembali pada Gambar 3.1 Tahap perencanaan penggunaan dana Kampung Wayane dapat menmghasilkan Progeram kerja pembangunan dengan menggunakan Anggaran Dana Kampung yang total jumlah yang dapat di terima sebanyak Rp. 710.424.000 pada tahun 2021

## **3. Pelaksanaan**

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh berdasarkan instrumen informan diatas pada tahapan Pelaksanaan, maka penulis berkesimpulan mengabarkan proses

perencanaan penggunaan Dana Kampung di Kampung Wayane, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat sebagai berikut;

- 1) terdapat keluhan dari masyarakat tentang proses implementasi atau pelaksanaan pembangunan di Kampung Wayane masih belum berjalan secara efisien.
- 2) Kepala Kampung bertempat tinggal di Kampung lainya (jarak tempuh 7-8 Km<sup>2</sup>) dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa Wayane. Dimana kepala Kampung dan Sekretaris Wayane datang saat proses yang berkaitan dengan Uang.
- 3) Intervensi bupati Kabupaten Maybrat dalam proses pengangkatan Kepala Kampung Wayane yang yang tidak sesuai dengan hati masyarakat, namun pengangkatan tersebut berdasarkan balas budi atas dukungan saat gelarnya pesta demokrasi 2017-2022. Hal tersebut menjadi pengaruh terhadap pembangunan di Kampung Wayane, dimana Kepala desa menjalankan seluruh amanah Bupati, yang tdiak berdasarkan hasil MUSKAM.
- 4) Pelaksanaan pembangunan yang menjadi objek terciptanya dua kelompok antara kelompok pemenang Bupati terpilih dan kelompok yang kalah. Hal ini merupakan pengaruh positif terhadap pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat Kampung Wayane.

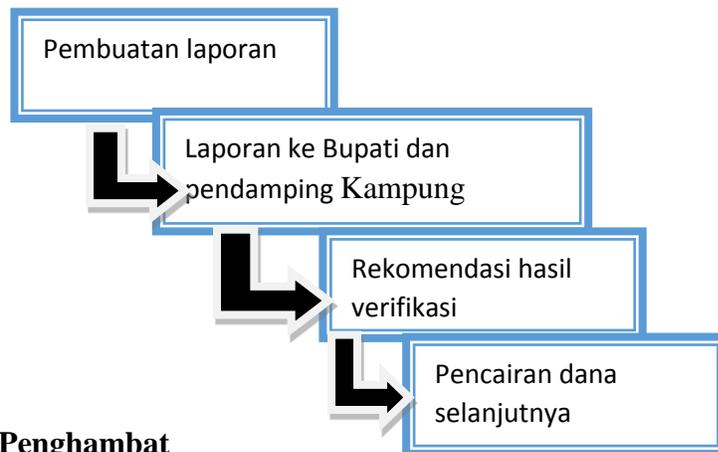
#### **4. Tahap Penatausahaan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh berdasarkan instrumen informan diatas sesuai dengan Penatausahaan, maka penulis berkesimpulan mengabarkan proses penatausahaan dari Dana Kampung di Kampung Wayane, yaitu. Tata usahaan yang dilakukan oleh Bendahara sebanaimana mestinya untuk meningkatkan modal kas Kampung hingga pada berujung terjadinya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Kampung Wayane. Oleh sebab itu penulis berkeseimpulan bahwa, bendahara dengan kepala Kampung Wayane dapat mengelola dana Kampung sesuai dengan versi merka. Sehingga tata usahaan anggaran dana Kampung belum berjalan efektif.

#### **5. Tahap Pelaporan**

Berdasarkan menurut hasil Wawancara dari kedua informan di atas tentang laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di Kampung Wayane. Berikut di gambarkan proses pelaporan pengelolaan dana Kampung yang di simpulkan dari Wawancara di atas adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Alur pelaporan pengelolaan dana desa di Kampung Wayane.



## 6. Faktor Penghambat

Dapat di simpulkan menjadi 3 (tiga)

- 1) Adanya rlsi kuasa yang terbangun dalam elit kabupaten dengan elit Kampung
- 2) Patron klien yang menjadikan kepala Kampung sebagi kedudukan tertinggi yang di iringi dengan karakter yang hegemonic.
- 3) Pengaruh intervensi elit kedaerahan dapat menggantungkan nasib Kampung di tangan para elit.

## B. Saran.

Berdasarkan data problematika dalam pengelolaan Dana Kampung di Kampung Wayane dimana telah diuraikan sebelumnya, maka sebagi penulis yang bertanggungjawab dalam skripsi ini. Problematika pengelolaan dana Kampung di Kampung Wayane yang dapat di sebabkan oleh beberapa faktor diatas, maka sebagi saran untuk mengatasi faktor-faktor tersebut adalah;

- a. Adanya pengetatan dari pemerintahan Pusat dalam memantau dan mengevaluasi total implementasu UU Kampung No. 6 Tahun 2014, agar menjadi sebuah tekanan kepada pemerintah Kabupaten Maybrat untuk memberikan hak otonom pemerintah Kampung agar dapat memilih Kepala Kampung dan mengelola Dana Kampung serta

membangun desa yang dapat mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat Kampung Wayane.

- b. Pemerintah Kabupaten Maybrat dapat melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bersama dengan 259 kepala Kampung serta aparaturnya tentang tata kelola Pemerintah Kampung dan tata Kelola Dana Kampung. Agar kepala Kampung tidak gegabah dalam proses melakukan tata kelola Roda Pemerintahan Kampung dan kelola Dana Kampung yang dapat sesuai dengan prosedur hingga mewujudkan masyarakat Kampung yang maju dan sejahtera.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alexander Sirait, S.E., M.E. Analisis APBN di Pusat Kajian

Anggaran;2021.<http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/publicfile/analisis-ringkas-cepat-public-37.pdf>)

Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia No. 222/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017;

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2017/50~PMK.07~2017Per.pdf> yang memberikan kewenangan kepada Desa

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi,33.Yogyakarta: Pustaka

Baru Press.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. UU No.6 Tahun 2014.

<file:///C:/Users/user/Downloads/185-Article%20Text-524-11020210929.pdf>

(Brodjonegoro, 2014) dikutip dalam Ismail (2016). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2),

2017, 671-680 menyatakan bahwa Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah.

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2014 pasal 1 ayat 9 yang mengatur tentang kegunaan “Angaran Dana Desa dari transferan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui Rekening Kabupaten/Kota”

Nmap, Nessus, dan Ethereal. Bandung : Tugas Akhir Institut Teknologi Bandung, <http://budi.insan.co.id/courses/ec5010/projects/thomas-report.pdf>, diakses 11 Februari 2012).

Latan, Hengki dan Ghazali Imam. 2012. *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Herry,S.E, M.Si. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Setiawan, Thomas. 2004. Analisis Keamanan Jaringan Internet Menggunakan Hping, [http://digilib.uinsby.ac.id/19349/1/Aris%20Zulfia%20Rifki\\_B75213038.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/19349/1/Aris%20Zulfia%20Rifki_B75213038.pdf)

Agoes, Sukrisno, I Cenik Ardana. (2009). Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun manusia Seutuhnya. Jakarta : Salemba Empat.

Abu Huraerah 2008, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Modal dan Strategi Pembangunan Berbasis kerakyatan, Bandung: Humaniora

[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ZTY5NmJlZjI3Mzk3ZDNGRhMDc2ZjZlMmQ2NGJjODM4N2U0Yg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTY5NmJlZjI3Mzk3ZDNGRhMDc2ZjZlMmQ2NGJjODM4N2U0Yg==.pdf)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6251/1/Fadli%20Ichsan.pdf> Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1989.

Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA

(Srimulyani Indrawati. Buku Pintar Dana Desa. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>).

Scott, James. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 384 hal

[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten\\_Fakfak&oldid=2056441](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Fakfak&oldid=2056441)

<http://repository.ummat.ac.id/1250/1/BAB%20I%2C%2C3%29.pdf>

(<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong/id/data-publikasi/berita-terbaru/2943-kabupaten-maybrat-peroleh-blt-dd-terbesar.html>)

<http://repo.apmd.ac.id/1809/1/LARAS%20LIANTIKA%20RAMBU%20MBO%20UTANG%2017520056.pdf>

<http://repo.apmd.ac.id/1809/1/LARAS%20LIANTIKA%20RAMBU%20MBONI%20UTANG%2017520056.pdf>

Lasswell, H. D. (1936). Politics; who gets what, when, how. New York: Whittlesey House.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, Cetakan 1988.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993

Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

## LAMPIRAN (DOKUMENTASI).

1. Bersama Kepala Kampung di Depan Kantor Kampung Wayane.



2. Penerimaan simbolis Bersama Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Wayane.



3. Bersama pemuda dan intelektual Kampung Wayane.



4. Pemasangan Ubul-Ubul Menyongsong 17 Agustus 2022.



5. Papan Struktur Perangkat Kampung Wayane.



6. Pos Ronda Kampung Wayane terdapat 3 Buah.



7. Jalan Cor yang di renofasi menggunakan anggaran dana Kampung.



8. Penyelesaian Perkara tuntutan Masyarakat Kampung Wayane kepada Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung Wayane agar dapat menetap di Kampung Wayane.

